

**PENGARUH TATA KELOLA DAN INTEGRITAS TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN
DANA DESADI KECAMATAN BANDA RAYA
KOTA BANDA ACEH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi**

OLEH :

SYUKUR MULTAZAM
NPM: 1802110038



**FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 07 September 2022

TANDA PERSETUJUAN/PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

SYUKUR MULTAZAM
NPM : 1802110038

Dengan judul:

**PENGARUH TATA KELOLA DAN INTEGRITAS TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA
DESA DI KECAMATAN BANDA RAYA
KOTA BANDA ACEH**

Yang diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana
Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh.

Menyetujui / Mengesahkan :

Ketua Program Studi
Akuntansi

Alkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Pembimbing I

Syamsidar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19730921 199901 2 001

Pembimbing II

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



Mengetahui,
Dekan,

Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
FAKULTAS EKONOMI
(TERAKREDITASI)

JALAN MUHAMMADIYAH NO. 91 BATHOH LUENG BATA
TELEPON (0651) 21023 FAX. 21023 – 34092
BANDA ACEH 23245

Jurusan : Akuntansi
Program : Sarjana S-1

Banda Aceh, 07 September 2022

TANDA PERSETUJUAN KOMISI UJIAN SKRIPSI

Dengan ini, kami menyatakan telah menyetujui/mengesahkan skripsi saudara:

SYUKUR MULTAZAM
NPM : 1802110038

Dengan judul:

**PENGARUH TATA KELOLA DAN INTEGRITAS TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA
DESA DI KECAMATAN BANDA RAYA
KOTA BANDA ACEH**

Yang telah dipertahankan di depan komisi ujian, pada tanggal 31 Agustus 2022

Menyetujui / Mengesahkan :
Komisi Ujian

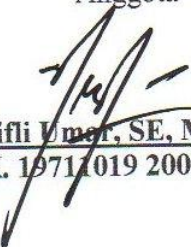
Ketua


Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM.
NIK. 19700408 199401 1 001

Sekretaris


Syamsidar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19730921 199901 2 001

Anggota


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

Anggota


Yusliana, SE, M.Si
NIK. 19650310 200410 2 001

Mengetahui
Ketua Program Studi Akuntansi


H. Zulkifli Umar, SE, M.Si, Ak, CA.
NIK. 19711019 200405 1 001

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“SAYA YANG BERTANDA TANGAN DI BAWAH INI MENYATAKAN BAHWA SKRIPSI INI TELAH DITULIS DENGAN SESUNGGUH-SUNGGUHNYA DAN TIDAK ADA BAGIAN YANG MERUPAKAN PENJIPLAKAN KARYA ORANG LAIN DI PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH, APABILA DI KEMUDIAN HARI TERBUKTI BAHWA PERNYATAAN INI TIDAK BENAR MAKA SAYA SANGGUP MENERIMA HUKUMAN/SANKSI SESUAI PERATURAN YANG BERLAKU”

Banda Aceh, 07 September 2022
Yang Menyatakan



SYUKUR MULTAZAM

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syukur Multazam
NPM : 1802110038
Program Studi : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh **Hak Bebas Royalty Non Eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

PENGARUH TATA KELOLA DAN INTEGRITAS TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan Hak Royalty Non-Eksklusif ini Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 07 September 2022

Banda Aceh, 07 September 2022
Yang Menyatakan



SYUKUR MULTAZAM

KATA PENGANTAR

Tiada kata yang paling indah selain puji dan rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Alhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini yang berjudul:

PENGARUH TATA KELOLA DAN INTEGRITAS TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan guna memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh. Semoga Skripsi ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk maupun pedoman bagi pembaca khususnya dalam bidang studi ekonomi manajemen. Namun Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan dan penyelesaian Skripsi ini tidak luput dari bantuan, bimbingan dan dorongan dari semua pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Untuk yang Mulia Ayahanda dan Ibunda tercinta sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terimakasih yang tiada terhingga yang telah membesarkan dan memberikan perhatian kasih sayang serta cinta kasih yang tiada terhingga.
1. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh
2. Bapak Zulfikar Umar, SE, M.Si, Ak, CA selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh beserta para Staf Pengajar yang telah membekali penulis dengan Ilmu Pengetahuan.

3. Ibu Syamsidar, SE, M.Si, AK selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk membimbing sejak awal hingga selesai skripsi ini.
4. Bapak Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan untuk kesempurnaan skripsi ini.
5. Perangkat Desa di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh yang telah berkenan mengisi kuesioner.
6. Buat keluarga besar di Kota Banda Aceh yang telah memberi perhatian dan dukungan selama penulis melaksanakan studi di Kota Banda Aceh.
7. Buat sahabat-sahabat angkatan 2018 yang telah banyak memberikan bantuan moril.

Demikianlah mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua, terutama kepada penulis sendiri. Namun penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajian maupun dalam pembahasannya, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini, semoga Allah SWT akan membalasNya dikemudian hari. *Amin ya Rabbal A'lamin.*

Banda Aceh, 23 Agustus 2022
Penulis

SYUKUR MULTAZAM

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
ABSTRAK	vi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Masalah Penelitian.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Ruang Lingkup Penelitian	8
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	9
2.1 Landasan Teoritis.....	9
2.1.1 Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa	9
2.1.1.1 Pengelolaan Keuangan Daerah.....	9
2.1.1.2 Pengertian Akuntabilitas	10
2.1.1.3 Jenis-jenis Akuntabilitas	13
2.1.1.4 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.....	15
2.1.2 Tata Kelola Pemerintah Desa.....	16
2.1.2.1 Pengertian Tata Kelola	16
2.1.2.2 Karakteristik Tata Kelola	17
2.1.2.3 Manfaat Tata Kelola	18
2.1.2.4 Indikator Tata Kelola Pemerintah Desa.....	19
2.1.2 Integritas	15
2.2.2.1 Pengertian Integritas.....	20
2.1.2.2 Indikator Integritas	21
2.2. Penelitian Sebelumnya	22
2.3. Kerangka Pemikiran	24
2.4. Hipotesis	25
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Desain Penelitian.....	26
3.1.1 Lokasi dan Objek Penelitian	26
3.1.2 Jenis Penelitian.....	26
3.1.3 Horizon Waktu	26
3.1.4. Unit Analisis	27
3.2 Populasi dan Sampel	27
3.3 Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data	28
3.4 Definisi dan Operasional Variabel.....	28
3.5 Metode Analisis Data.....	30
3.6 Pengujian Validitas dan Reliabilitas	31
3.7 Pengujian Hipotesis.....	33

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
4.1 Gambaran Umum Kecamatan Banda Raya	37
4.2 Karakteristik Responden	38
4.3 Deskriptif Variabel Penelitian.....	39
4.3.1 Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa ..	39
4.3.2 Variabel Tata Kelola	41
4.3.3 Variabel Integritas.....	43
4.4 Hasil Pengujian Instrumen	44
4.3.1 Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas.....	44
4.3.2 Hasil Pengujian Asumsi Klasik.....	47
4.5 Pembahasan Hasil Penelitian	50
4.5.1 Koefisien Regresi Linier Berganda.....	51
4.5.2 Koefisien Korelasi dan Diterminasi	52
4.5.3 Hasil Pengujian Hipotesis	53
4.5.3.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama	53
4.5.3.2 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua	54
4.5.3.3 Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga	54
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	55
5.1. Kesimpulan	55
5.2. Saran-saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA.....	57

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1. Hasil Penelitian Sebelumnya.....	23
Tabel 3.1. Populasi dan Sampel	27
Tabel 3.2. Skala Pengukuran.....	28
Tabel 3.3. Definisi Operasionalisasi Variabel.....	29
Tabel 4.1. Karakteristik Responden	38
Tabel 4.2 Gambaran Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.....	39
Tabel 4.3 Gambaran Tata Kelola Pemerintah Desa di Kecamatan Banda Kota Banda Aceh	41
Tabel 4.4 Gambaran Integritas Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Banda Kota Banda Aceh.....	43
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas	45
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas.....	46
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas	48
Tabel 4.8 Hasil Analisis Model Regresi	50
Tabel 4.9 Hasil Analisis Korelasi dan Diterminasi.....	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran	25
Gambar 4.1 Scater Plot Normalitas	47
Gambar 4.2 Plot Heterokedastisitas.....	49

**PENGARUH TATA KELOLA DAN INTEGRITAS TERHADAP
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA
DI KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH**

NAMA : SYUKUR MULTAZAM
NIM : 1802110038

Pembimbing :

1. Syamsidar, SE, M.Si, AK
2. Drs. Tarmizi Gadeng, SE, M.Si, MM

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola dan integritas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh baik secara parsial maupun simultan. Populasi penelitian ini adalah seluruh perangkat desa yang terdiri dari Geuchik Gampong, Sekretaris Gampong, Kaur Keuangan, Kepala Dusun dan Tuha Peut di 10 Gampong di Kecamatan Banda Raya yang berjumlah sebanyak 90 responden atau masing-masing gampong mewakili 3 (tiga) perangkat desa. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara total sampling atau sampel jenuh atau juga disebut dengan sampel sensus yaitu dengan mengambil seluruh populasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah informasi yang di kumpulkan langsung dari responden dengan menggunakan kuesoner tertutup. Hasil penelitian menjelaskan bahwa secara simultan tata kelola dan integritas secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya. Tata kelola berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,420 satuan. Integritas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,411 satuan.

Kata kunci: tata kelola, integritas, akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa saat ini menempati strata yang amat penting dalam proses pembangunan di Indonesia. Desa tidak lagi menjadi objek pembangunan nasional, namun merupakan subjek pembangunan nasional. Adanya kucuran dana desa yang relatif besar dari pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang lebih kepada pemerintah Desa untuk membangun desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) telah menempatkan pembangunan desa sebagai poros pembangunan nasional (Harnovinsah, 2020:93).

Menurut Peraturan Pemerintah No 222/PMK.02/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa menjelaskan Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Seluruh kegiatan ini menurut Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa perlu diselenggarakan berdasarkan azas kepastian hukum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Dalam pengelolaan dana desa diperlukan akuntabilitas yaitu pertanggungjawaban yang berbentuk laporan atau informasi yang keuangan yang jelas, objektif dan transparan. Seluruh transaksi pengeluaran dan penerimaan

keuangan dana desa perlu dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku dan penggunaan keuangan dana desa untuk pelaksanaan program desa harus dilaksanakan sesuai dengan rencana hasil musyawarah masyarakat (Nugroho dan Firre, 2021:6).

Akuntabel atau akuntabilitas merupakan salah satu asas yang perlu dan wajib dilaksanakan dalam pengelolaan keuangan desa. Akuntabilitas adalah perwujudan kewajiban suatu entitas instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target yang telah ditetapkan (Perpres Nomor 29 Tahun 2014). Namun berbagai masalah telah timbul dalam penggunaan dana desa karena pengelolaan keuangan dana desa yang tidak akuntabel seperti membuat rancangan anggaran pengadaan barang dan jasa yang lebih tinggi dari biaya aktual yang semestinya dikeluarkan, memanfaatkan dan mencairkan anggaran dari dana desa dengan memanfaatkan proyek pembangunan infrastruktur fisik yang bersumber dari sumber dana lainnya, meminjam dana desa untuk kepentingan pribadi namun tidak dikembalikan, pembelian inventaris kantor seperti laptop dengan dana desa namun digunakan untuk keperluan pribadi, menaikkan anggaran belanja (mark up) yang tidak rasional untuk pembayaran honorarium perangkat desa maupun pembayaran alat tulis kantor, pemangkasan anggaran publik kemudian dialokasikan untuk kepentingan perangkat desa (Berdesa, 2020). Kondisi ini telah dan akan terjadi di berbagai daerah di Indonesia termasuk di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

Kecamatan Banda Raya merupakan salah satu dari 10 Kecamatan di Kota Banda Aceh. Kecamatan Banda Raya membawahi 10 Pemerintahan Gampong yang

dipimpin oleh geuchik gampong. Dalam melaksanakan tuntutan program pembangunan desa yang terus meningkat, maka sejak tahun 2015 seluruh Gampong di Kecamatan Banda Raya sudah menerima kucuran dana dari mekanisme transfer pemerintah pusat, pemerintah Povinsi maupun dari Pemerintah Kabupaten/Kota hingga mencapai ratusan juta rupiah. Dengan dukungan dana desa yang begitu besar tersebut membuat Pemerintah Gampong di Kecamatan Banda Raya dapat memiliki hak dan kesempatan untuk melaksanakan pembangunan secara patisipasi dan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Lebih dari itu, dengan adanya mekanisme transfer dana desa tersebut, pemerintah Gampong di Kecamatan Banda Raya juga dapat memberdayakan dan menggerakkan kemampuan masyarakat desa untuk melakukan pembangunan secara mandiri sesuai dengan kebutuhan.

Menghadapi program pembangunan desa yang terus meningkat di Kecamatan Banda Raya membuat keuangan dana desa harus dapat mempertanggungjawabkan melalui sistem pengelolaan keuangan desa yang akuntabel. Akuntabilitas adalah kemampuan pemerintah Gampong di Kecamatan Banda Raya untuk mempertanggungjawabkan semua program kerja kegiatan yang telah dilaksanakan dengan menggunakan dana desa baik berdasarkan nilai anggaran yang telah digunakan maupun berdasarkan kebijakan yang telah dilakukan. Akuntabilitas mengharuskan pemerintah Gampong di Kecamatan Banda Raya untuk selalu dapat memanfaatkan dana desa secara efisien dan efektif serta dapat membuat keputusan secara baik, adil dan merata bagi kepentingan masyarakat. Dalam praktiknya walaupun akuntabilitas keuangan dana desa telah dapat terwujud secara hukum maupun keuangan, namun secara proses, program dan kebijakan pengelolaan keuangan dana desa masih

menyimpan berbagai permasalahan. Kondisi ini disebabkan oleh berbagai faktor termasuk di antaranya adalah tata kelola pemerintahan yang baik dan integritas.

Tata kelola identik dengan manajemen dan organisasi. Tata kelola adalah tata cara pemerintahan desa dalam mengelola keuangan dana desa untuk berbagai tujuan berdasarkan kaidah, aturan, sistem dan cara-cara yang baik (Raharjo, 2021:3). Lahirnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa membawa dampak yang positif terhadap tata kelola pemerintahan desa dan manajemen keuangan desa. Desa memiliki hak kekuasaan penuh untuk mengelola pemerintahan desanya secara mandiri atau otonom. Undang-Undang tersebut juga semakin memperkuat peran dan fungsi kelembagaan Desa yang menjadi unsur penting dalam manajemen dan organisasi desa.

Tata kelola pemerintahan desa yang baik adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan desa yang solid dan bertanggung jawab dengan cara demokrasi, efisien, penghindaran salah alokasi anggaran, memiliki komitmen dalam pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, dapat menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal framework* bagi tumbuhnya aktifitas kewiraswastaan (Bank Dunia dalam Chandra 2016). Tujuan pokok dari tata kelola pemerintahan desa adalah mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan tata kelola Pemerintahan desa dan meningkatkan daya saing desa (Maghviroh, 2019).

Dengan demikian fungsi-fungsi dalam pemerintahan desa di Kecamatan Banda Raya perlu untuk dimaksimalkan agar bisa sejalan dengan tujuan tata kelola desa tersebut. Tata kelola pemerintahan Desa di Kecamatan Banda Raya juga harus

dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar desa-desa di Kecamatan tersebut bukan hanya bisa mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan yang dilakukan tetapi juga bisa meningkatkan daya saing desa. Artinya dengan pengelolaan yang baik, pemerintahan desa di Kecamatan Banda Raya bisa punya arah dan tujuan yang jelas untuk dicapai. Pemerintah desa juga tahu kemana arah yang akan dituju serta memiliki ukuran yang jelas dalam menilai kinerja pemerintahan desa. Tata kelola pemerintah desa yang baik akan dapat mengarahkan pengelolaan keuangan dana desa sesuai dengan azas dan prinsip yang diharapkan yaitu akuntabel, efektif, efisien (Ubaidillah dan Dian, 2018).

Tata kelola pemerintah yang baik harus diwujudkan oleh Pemerintah Desa di Kecamatan Banda Raya melalui berbagai cara yaitu dengan penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat dalam berbagai bentuk pertemuan dan musyawarah desa, adanya papan atau media informasi yang handal dan terpercaya. Pemerintah Desa di Kecamatan Banda Raya juga harus selalu melibatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa melalui musyawarah desa. Kemudian dalam penggunaan dana desa setiap gampong di Kecamatan Banda Raya juga harus selalu bertindak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Jika kondisi ini dapat dilaksanakan secara baik maka akan memberi dampak positif bagi tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa. Dengan tata kelola yang baik maka pemerintah desa akan memiliki organisasi yang kuat dan partisipatoris, terbuka bagi masyarakat. Tata kelola pemerintah desa yang berkualitas juga akan mendorong adanya pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi dan adanya aparatur desa yang bertanggungjawab, yang profesional dan patuh pada aturan hukum. Namun masih lemahnya kompetensi sumber daya manusia yang terlibat dalam manajemen

desa masih saja menjadi masalah dalam menciptakan tata kelola pemerintah Desa di Kecamatan Banda Raya yang berkualitas.

Kemudian integritas juga menjadi salah satu faktor yang ikut mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya. Integritas adalah suatu konsep yang merujuk pada konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Nilai dan prinsip ini tentunya tidak lepas dari yang namanya kebenaran. Integritas merupakan suatu sikap yang merujuk pada konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai dan prinsip kebaikan serta ucapan. Dalam aspek etika, integritas dapat diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang (Mahardi, 2017:21).

Dalam melaksanakan tugas pemerintah dan pembangunan seorang Aparatur Desa di Kecamatan Banda Raya harus bersikap jujur, ikhlas, dan tidak pernah menyalahgunakan wewenangnya serta berani menanggung risiko dari tindakan yang dilakukannya. Integritas mencakup sifat yang luas dan komprehensif meliputi bertanggung jawab, jujur, menepati kata-kata, dan setia. Integritas tidak pernah lepas dari kepribadian dan perilaku pegawai dalam bekerja, dan berhubungan dengan sifat yang dipercaya, komitmen, tanggung jawab, kejujuran, kebenaran, dan kesetiaan terhadap tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Perilaku ini akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Namun aparatur desa yang sudah tegak integritasnya namun karena berbagai godaan dan banyak kepentingan pribadi yang harus dikejar dalam bekerja sering membuat buruknya integritas kerja mereka (Darmanto dan Nur, 2019:11). Keinginan memiliki sesuatu dengan segala cara dan kalau perlu dengan cara yang singkat dan bahkan melanggar aturan akan membuat seorang aparatur desa kehilangan integritasnya dan membuat mereka tidak dapat bekerja secara produktif.

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **Pengaruh Tata Kelola dan Integritas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang sebelumnya maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Apakah tata kelola dan integritas secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.
2. Apakah tata kelola berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.
3. Apakah integritas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah sebelumnya maka yang menjadi tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh tata kelola dan integritas secara bersama-sama terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui pengaruh tata kelola terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

3. Untuk mengetahui pengaruh integritas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat melengkapi temuan empiris bagi penelitian lanjutan dan pengembangan ilmu akuntansi sektor publik.
2. Dapat memperluas wawasan berfikir penulis dalam memahami pengaruh tata kelola dan akuntabilitas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kecamatan banda Raya atau Pemerintah Kecamatan lainnya dalam meningkatkan tata kelola, akuntabilitas dan pengelolaan keuangan dana desa.
2. Dapat mengembangkan kemampuan penulis dalam mengimplementasi teori akuntansi sektor publik dalam penerapan nya di lapangan.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengambil skop akuntansi keprilakuan dengan menitik beratkan pada akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, tata kelola pemerintah desa dan integritas pemerintah desa dengan lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

BAB II

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Landasan Teoritis

2.1.1 Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.1.1.1 Pengelolaan Dana Desa

Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan keuangan dana desa. Dalam rangka mendukung tata kelola yang baik untuk penyelenggaraan desa, pengelolaan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang transparan, akuntabel partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan keuangan dana desa dikelola dalam masa satu tahun anggaran yakni mulai 1 januari sampai dengan tanggal 31 desember (Menurut Undang-Undang Nomor 6 Pasal 71 Ayat (1) Tahun 2014).

Keuangan desa menurut Nurcholis (2011:81) adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pendapat yang sama juga di kemukakan oleh Soleh dan Heru (2015:3) keuangan desa didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun bbarang yang dapat dijadikan milik desa yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kemudian Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan dana desa, menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan keuangan desa (Pasal 2, Permendagri No 113 Tahun 2014).

Caro (2015:5) menjelaskan pengelolaan keuangan dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Penyelenggaraan kewenangan Desa yang di tugaskan oleh Pemerintah didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara. Dana anggran pendapatan dan belanja negara dialokasikan pada bagian anggaran kementrian/lembaga dan disalurkan melalui satuan kerja perangkat daera (SKPD) kabupaten/kota.

Dengan demikian pengelolana dana desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa sesuai dengan paraturan yang berlaku dalam bentuk hak dan kewajiban yang timbul dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang.

2.1.1.2 Pengertian Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan istilah yang melekat dalam kajian tata pemerintahan (*Governance*). Akunta-bilitas memiliki beberapa makna yang terminologinya sering dikaitkan dengan beberapa konsep seperti *answerability*, *responsibility*, *liability* dan terminologi lain yang berkaitan dengan harapan pemberi mandat dengan pelaksana mandat. Dalam konteks politik, secara singkat *accountability* mencakup harapan atau

asumsi perilaku hubungan antara pemberi mandat dan penerima mandat, sedangkan dalam konsep yang lebih luas *accountability* memungkinkan adanya *negative feedback* setelah keputusan atau tindakan diambil, sehingga *accountability* memiliki fungsi yang amat penting untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan fasilitas, sarana, dan anggaran publik oleh suatu institusi (Setiyono, 2014: 181).

Halim dan Muhamad (2012:83) menjelaskan akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kemudian Mardiasmo (2004:46) dalam Umami dan Idang (2017) menjelaskan akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas publik adalah kewajiban agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (prinsipal) (Mahmudi, 2010:23). Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung- jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja serta tindakan seseorang / pimpinan suatu unit organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau yang berwenang meminta pertanggungjawaban (Nafidah dan Nur, 2017).

Akuntabilitas dalam pemerintah desa sebagaimana diungkapkan oleh Sukasmanto dalam Nafidah dan Nur (2017) melibatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya

dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya.

Moncieffe (2001) dalam Hasniati (2016) menjelaskan akuntabilitas dapat berfungsi sebagai (1) *ex-post facto accountability*, dan (2) *ex-ante accountability*.

1. Dari perspektif *Ex-post facto* pada intinya akuntabilitas mengharuskan pejabat dan lembaga publik untuk bertanggung jawab atas kewenangan yang ada pada mereka (*answering for the use of authority*) melalui norma hukum, monitoring sistem, mekanisme penilaian (*appraisal mechanism*) melalui lembaga publik lain yang independen (seperti institusi auditor dan kejaksaan) yang diberikan hak untuk memeriksa setiap lembaga publik terhadap rasionalitas kinerja yang dilakukan oleh birokrasi.
2. Dari perspektif *ex-ante (positive) accountability* pada intinya mengharuskan pejabat publik untuk selalu merepresentasikan keinginan rakyat dalam setiap pelaksanaan kebijakan yang mereka ambil. Mereka harus selalu mengkonsultasikan secara terus menerus setiap tindakan pada publik, memberikan alternatif pilihan atau solusi, memberikan informasi atau penjelasan yang lengkap, dan juga menyediakan mekanisme bagi publik untuk memberikan masukan atau mengecek kualitas kebijakan para pejabat serta merevisinya bila dipandang perlu.

Sumpeno dalam Nafidah dan Nur (2017) meningkatkan kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Pendapatan Asli Desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD), dan Dana Desa (DD) termasuk komponen di dalamnya.

2.1.1.3 Jenis-jenis Akuntabilitas

Akbar (2012) mengatakan bahwa Akuntabilitas (accountability) secara harfiah dapat diartikan sebagai pertanggungjawaban, namun penerjemahan secara sederhana ini dapat mengaburkan arti kata accountability itu sendiri bila dikaitkan dengan pengertian akuntansi dan manajemen. Lebih lanjut dikatakan bahwa konsep akuntabilitas tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Stewart tentang jenjang atau tangga akuntabilitas yang terdiri dari 5 (lima) jenis tangga akuntabilitas yakni: 1) accountability for probity and legality; 2) process Accountability; 3) performance Accountability; 4) programme Accountability; dan 5) policy Accountability.

Akuntabilitas publik yang harus dilakukan organisasi publik terdiri dari beberapa dimensi. Ellwood (1993) dalam Mardiasmo (2012:22) menjelaskan terdapat empat dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi publik yaitu :

1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum
Akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan dalam penggunaan sumber dana public
2. Akuntabilitas proses
Akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi
3. Akuntabilitas program
Akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan yang ditetapkan dapat dicapai atau tidak, dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya minimal.
4. Akuntabilitas kebijakan
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah, baik pusat maupun daerah, atau kebijakan-kebijakan yang diambil terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Menurut Mahmudi (2013:9) mengemukakan ada lima bentuk akuntabilitas publik, yaitu :

- 1) Akuntabilitas hukum dan kejujuran, yaitu akuntabilitas lembaga publik untuk berperilaku jujur dan dapat mentaati berbagai peraturan. Sementara akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diterapkan dalam organisasi. Bentuk-bentuk akuntabilitas hukum dan kejujuran adalah:
 1. penggunaan dana publik harus dilakukan secara benar dan telah mendapatkan otoritas.
 2. tidak terjadi penyalahgunaan jabatan, korupsi dan kolusi.
 3. terlaksananya praktik organisasi yang sehat.
- 2) Akuntabilitas manajerial, yaitu pertanggungjawaban lembaga publik untuk melaksanakan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien. Jenis akuntabilitas ini dapat diwujudkan melalui pemberian pelayanan yang cepat, responsif, dan murah biaya.
- 3) Akuntabilitas program, yaitu pertanggungjawaban lembaga publik yang terkait dengan perimbangan program kerja, atau apakah pemerintah daerah telah mempertimbangkan alternatif program yang dapat memberikan hasil optimal dengan biaya yang minimal. Program-program organisasi hendaknya program yang bermutu.
- 4) Akuntabilitas kebijakan, yaitu pertanggungjawaban lembaga publik atas kebijakan-kebijakan yang di ambil. Dalam membuat kebijakan lembaga publik hendaknya:
 2. mempertimbangkan tujuan dan sasaran dengan baik.
 3. kebijakan yang diambil memberi dampak dan manfaat positif bagi masyarakat
- 5) Akuntabilitas finansial, yaitu pertanggungjawaban lembaga publik dalam menggunakan uang publik secara ekonomi, efisien dan efektif dan tidak ada kebocoran dan pemborosan dana anggaran. Akuntabilitas finansial mengharuskan lembaga publik untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan.

Dengan demikian akuntabilitas memiliki banyak dimensi. Beberapa dimensi yang harus diperhatikan dalam pengelolaan organisasi pemerintah adalah terdiri dari akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses dan manajerial, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan.

2.1.1.4 Indikator Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Lembaga Administrasi Negara (2007) dalam Novitaningrum (2014) memberikan indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur pelaksanaan akuntabilitas adalah sebagai berikut:

1. Akuntabel pengelolaan anggaran yang dikeluarkan.
2. Pertanggungjawaban kinerja
3. Intensitas penyimpangan
4. Upaya tindak lanjut penyimpangan.

Menurut Adisasmita (2011:90) dalam pelaksanaan akuntabilitas dilingkungan instansi pemerintah perlu prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Harus ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf untuk melakukan pengelolaan pelaksanaan misi agar akuntabel.
- 2) Harus merupakan suatu sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber-sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- 3) Harus dapat menunjukkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
- 4) Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh.
- 5) Harus jujur, objektif dan inovatif sebagai katalisator perubahan manajemen instansi pemerintah dalam bentuk pemutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan penyusunan laporan akuntabel.

Akuntabilitas dioperasionalkan dengan indikator-indikator yang dijelaskan oleh Krina (2003) dalam Adiwirya dan I Putu (2015) yaitu

1. Keakuratan dan kelengkapan informasi mengenai sasaran suatu program,
2. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa,
3. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil,
4. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan serta mekanisme pengaduan masyarakat,
5. Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas,
6. proses pembuatan sebuah keputusan yang memenuhi standar etika dan nilai yang berlaku dibuat secara tertulis dan tersedia bagi warga yang

membutuhkan serta sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar, dan kejelasan dari sasaran kebijakan.

Pengukuran akuntabilitas dana desa dapat menggunakan tiga indikator adalah sebagai berikut:

- 1) pertanggungjawaban dana publik;
- 2) penyajian laporan tepat waktu; dan
- 3) adanya pemeriksaan (audit)/respon pemerintah

Berhubungan dengan akuntabilitas dana desa maka Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Solekhan (2014:82) mengamanahkan dalam pengelolaan keuangan dana desa Kepala Desa wajib:

- 1) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa setiap akhir tahun
- 2) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah Desa setiap akhir masa jabatan
- 3) Menyampaikan laporan keterangan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setiap akhir tahun anggaran.
- 4) Memberikan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat disetiap adanya program kerja kegiatan.

2.1.2 Tata kelola Pemerintah Desa

2.1.2.1 Pengertian Tata kelola

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan desa, pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (Santosa 2008 dalam Astuti dan Yulianto, 2016).

World bank dalam Adisasmita (2011:21) mendefinisikan *Good governance* adalah sebagai : “Suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan

bertanggung jawab oleh pemerintah yang dilakukan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha”.

Good governance menurut Solekhan (2014:82) penyelenggaraan pemerintahan Negara dan Daerah termasuk pemerintahan Desa yang solid dan bertanggungjawab, efektif dan efisien dengan menjaga keseimbangan sinergiinteraksi yang konstruksi antara pemerintah desa dan masyarakat. Sementara menurut United Nations Development Programme (UNDP) juga dalam Adisasmita (2011:21) mengartikan *governance* adalah penerapan kekuasaan politik, ekonomi dan administrasi untuk mengelola urusan suatu bangsa pada berbagai tingkatan.

2.1.2.2 Karakteristik Tata Kelola

Karakteristik pelaksanaan *Good governance* menurut UNDP (dalam Adisasmita, 2011:24) sebagai berikut :

- a. Partisipasi (*Participation*), keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. Dalam hal ini mendorong setiap warga negara dapat menggunakan hak menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik.
- b. Penegakan Hukum (*Rule of law*), kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Mewujudkan adanya law enforcement yang adil tanpa kecuali yang menunjang HAM dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.
- c. Transparansi (*Transparency*), transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan. Menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan untuk mendapatkan informasi.

- d. Daya Tanggap (*Responsiveness*), lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder. Dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepekaan para penyelenggara pemerintah terhadap aspirasi masyarakat tanpa pengecualian.
- e. *Consensus orientation*, berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas. Memberikan pelayanan-pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat.
- f. Kesetaraan (*Equity*), setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan. Memberikan peluang yang sama kepada setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan.
- g. Efektifitas dan Efisiensi (*Efficiency and Effectiveness*), pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif). Menjamin terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggungjawab.
- h. Akuntabilitas (*Accountability*), pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan. Bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas.
- i. Visi Strategi (*Strategic vision*), penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan. Bertujuan untuk membangun berdasarkan visi dan strategi yang jelas dan mengikutsertakan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.

Sedangkan Permendagri No 13 tahun 2006 menekankan konsep *Good governance* yaitu:

1. Transparansi: keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai organisasi.
2. Kemandirian: suatu keadaan dimana perusahaan (lembaga) dikelola secara profesional tanpa bantuan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
3. Akuntabilitas: kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan organisasi terlaksana secara efektif).

2.1.2.3 Manfaat Tata Kelola Pemerintah

World Bank menjelaskan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab dan sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administrative, menjalankan

disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha yang baik (Mardiasmo, 2009 dalam Uar, 2016).

Untuk sektor publik, Komite Nasional Kebijakan Governance (2008) dalam Susanto et.al (2015), mengemukakan manfaat penerapan good governance di sektor publik adalah sebagai berikut:

sangat diyakini akan memberikan kontribusi yang strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, serta sangat efektif menghindari penyimpanganpenyimpangan dan sebagai upaya pencegahan terhadap tindakan korupsi dan suap.

2.1.2.4 Indikator Tata Kelola Pemerintah Desa

Nubatonis et.al (2014) menjelaskan indicator yang digunakan untuk mengukur good governance adalah sebagai berikut:

1. Profesionalitas yaitu kemampuan, keahlian serta moral pemerintah dalam memberikan pelayanan,
2. Akuntabilitas yaitu tanggungjawab pemerintah terhadap tugas yang diberikan serta kebijakan atau keputusan yang diambil,
3. Transparansi yaitu keterbukaan pemerintah, penyediaan informasi, kemudahan memperoleh informasi,
4. Pelayanan prima yaitu prosedur pelayanan, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, kelengkapan sarana dan prasarana serta etika pelayanan,
5. Demokrasi dan Partisipasi yaitu kebebasan masyarakat dalam menyampaikan pendapat, keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan kesamaan hak dalam memperoleh pelayanan,
6. Efisiensi dan Efektifitas yaitu pelaksanaan dan penca paiaan hasil kinerja pelayanan,
7. Supremasi hokum yaitu keadilan penegakan hukum, serta Hak Asasi Manusia;

Variabel good governance menurut Uar (2106) dapat diukur dengan menggunakan indikator-indikator yaitu transparansi, responsivitas, akuntabilitas. Menurut Chandra (2016) penerapan Prinsip *good Governance* dapat diukur dengan indicator .

1. Akuntabilitas, meliputi :
 - a. Tanggung jawab;
 - b. Kecepatan layanan.
2. Transparansi, meliputi :
 - a. Keterbukaan;
 - b. 2. Kepastian waktu.
3. Partisipasi Masyarakat, meliputi :
 - a. Kesempatan untuk bertanya / memperoleh informasi;
 - a. Keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan /
 - b. pengambilan keputusan.
4. Supremasi
 - a. Hukum, meliputi :
 1. Keamanan / Kepastian Hukum;
 2. Keadilan yang merata

Terkait dengan tata kelola yang baik, maka Bhatta (1996) dalam Solekhan (2014:82) menyebutkan 4(empat) unsur good governance yaitu::

- 1) *Accountability*: menjelaskan peran dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan pemeriksaan dan kedisiplinan dalam melengkapi pekerjaan, juga pelaporan.
- 2) *Transparency* (transparansi): hendaknya berusaha untuk selalu transparansi terhadap informasi laporan keuangan klien yang diaudit.
- 3) *Participacion* (partisipasi): bebas ikut serta, memberi suara dan berpartisipasi dalam program kerja pemerintah.
- 4) *Rule of law* (Penegakan Hukum), kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Mewujudkan adanya law enforcement yang adil tanpa memihak atau pilih kasih yang menunjang HAM dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

2.1.3 Integritas

2.1.3.1 Pengertian Integritas

Secara bahasa integritas atau *integrity* berarti keutuhan, kebulatan, kejujuran, kesamaan antara hati, ucapan, dan tindakan. Integritas erat kaitannya dengan moral dan etika. Secara etimologi, kata integritas berasal dari bahasa latin yaitu *integer* (keseluruhan atau lengkap) yang berarti utuh, bulat, penuh suci atau bersih. Untuk itu integritas bisa dimaknai sebagai cara hidup yang bersih, sehat, dan damai sejahtera secara menyeluruh. Dengan kata lain, integritas berasal dari beberapa sudut pandang,

seperti sudut pandang tradisi etika (*ethical tradition*) dan dalam hubungan etika (*ethical relationship*) (Abdullah 2019: 5-6).

Integritas menurut Darmanto dan Nur (2019:5) adalah suatu usaha yang utuh dan lengkap yang disadari dengan kualitas, kejujuran serta konsistensi karakter seseorang. Kemudian Mahardi (2017:21) menjelaskan integritas adalah suatu konsep yang merujuk pada konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Nilai dan prinsip ini tentunya tidak lepas dari yang namanya kebenaran. Integritas merupakan suatu sikap yang merujuk pada konsistensi antara tindakan dengan nilai-nilai dan prinsip kebaikan serta ucapan. Dalam aspek etika, integritas dapat diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang.

Menurut Zahra (2011: 123) dalam (Rani *et al.*, 2018) integritas adalah komitmen untuk melakukan segala sesuatu sesuai dengan prinsip yang benar dan etis, sesuai dengan nilai dan norma, dan ada konsistensi untuk tetap melakukan komitmen tersebut pada setiap situasi tanpa melihat adanya peluang atau paksaan untuk keluar dari prinsip. Lebih lanjut Hay *Consultant*, yang di kutip dalam Abdullah (2019: 5-6) menjelaskan integritas adalah konsistensi antara tindakan yang diyakini seseorang. Mengungkapkan maksud, gagasan dan perasaannya secara terbuka dan langsung juga menghargai keterbukaan dan kejujuran orang lain, bahkan dalam situasi sulit sekalipun.

2.1.3.2 Indikator Integritas

Selanjutnya, membagi integritas menjadi beberapa macam antara lain:

1. Terbuka dan jujur mengenai situasi pekerjaan
2. Bertindak secara konsisten dengan nilai-nilai dan keyakinan

3. Bertindak sesuai dengan nilai-nilai saat hal tersebut sulit dilakukan
4. Bertindak berdasarkan nilai-nilai sekalipun hal tersebut mengandung biaya dan resiko yang cukup besar

2.2. Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan Ubaidillah dan Dian (2018) dengan judul pengaruh tata kelola dan integritas terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa berhasil menyimpulkan bahwa tata kelola berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. tata kelola pemerintah desa perlu diperbaiki untuk menciptakan pengelolaan dana desa yang baik sehingga akuntabilitas pemerintahan desa semakin akuntabel dalam pengelolaan dana desa. integritas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa Aparatur pemerintahan desa harus mempunyai sikap integritas untuk menghindari terjadi korupsi, sehingga pengelolaan dana desa semakin baik dan akuntabilitas pengelolaan dana desa bisa akuntabel.

Penelitian yang dilakukan Kirana dan Elan (2018) dengan judul pengaruh tata kelola keuangan desa terhadap akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus pada Desa-Desa di Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi). Berhasil mengungkapkan bahwa secara parsial tata kelola keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas alokasi dana desa dengan hasil thitung $4,452 > ttabel$ 1,995.

Penelitian yang dilakukan Ardiani (2019) dengan judul pengaruh integritas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (studi kasus di Kecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin). Penelitian ini berhasil mengungkapkan bahwa secara

parsial variabel integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengeolaan keuangan dana desa.

Penelitian yang dilakukan Asmoro et al., (2020) dengan judul Pengaruh tata kelola dana program pemberdayaan masyarakat terhadap akuntabilitas program Pemerintahan Kota Kediri. Penelitian ini berhasil menyimpulkan bahwa tata kelola dengan melibatkan variabel efisiensi, efektifitas ekonomis, akses informasi dan sistem pelaporan telah mencapai target atau tujuan untuk kepentingan warga yang merasakan manfaat program yang telah dilaksanakan, serta kemudahan akses informasi dan sistem pelaporan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan. Maka dapat disimpulkan bahwa tata kelola dana Prodamas di tingkat Kelurahan Pesantren Pemerintahan Kota Kediri adalah baik karena telah akuntabel dalam pengelolaan dana pada Program Pemberdayaan Masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Safitri (2020) dengan judul pengaruh integritas, kompetensi sumber daya manusia dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berhasil menyimpulkan bahwa integritas dan kompetensi sumber daya manusia menjadi pengaruh dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sedangkan transparansi tidak mempengaruhi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Hasil penelitian sebelumnya serta persamaan dan perbedaannya dengan penelitian sekarang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Pengaruh Tata Kelola Dan Integritas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Ubaidillah dan Dian, 2018).	Structural Equation Modeling (SEM)	Tata kelola dan integritas baik secara parsial maupun simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa	Variabel independen: tata kelola pemerintah dan integritas Variabel dependen: akuntabilitas pengelolaan keuangan desa	Objek dan lokasi penelitian Sampel penelitian. Model analisis
2	Pengaruh tata kelola keuangan desa terhadap akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kebonpedes Kab Sukabumi (Kirana dan Elan, (2018).	Analisis Regresi	Tata kelola keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas alokasi dana desa	variabel independen tata kelola variabel dependen akuntabilitas ADD	Objek dan lokasi penelitian Sampel penelitian.
3	Pengaruh integritas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Rambutan Kab. Banyuwasin (Ardiani, 2019).	integritas berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa	tata kelola keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas alokasi dana desa	variabel independen integritas variabel dependen akuntabilitas pengelolaan keuangan	Objek dan lokasi penelitian Sampel penelitian.
4	Pengaruh tata kelola dana program pemberdayaan masyarakat terhadap akuntabilitas program Pemerintahan Kota Kediri (Asmoro et al., 2020)	Analisis Regresi	tata kelola dana program pemberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap akuntabilitas program Pemerintahan	variabel independen tata kelola variabel dependen akuntabilitas program pemerintah	Objek dan lokasi penelitian Sampel penelitian.
5	Pengaruh integritas, kompetensi sumber daya manusia dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. (Safitri, 2020)	Analisis Regresi	Integritas dan kompetensi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. transparansi tidak berpengaruh	Variabel Independen: akuntabilitas Variabel dependen: pengelolaan keuangan desa	Objek dan lokasi penelitian Sampel penelitian.

2.3 Kerangka Pemikiran

2.3.1 Hubungan Tata Kelola Dengan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yaitu transparan, akuntabel dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan dana desa adalah untuk mewujudkan pemerintah desa yang bersih, bermartabat dan akuntabel (Ubaidillah dan Dian, 2018). Dengan tata kelola yang baik maka pemerintah akan memiliki organisasi yang kuat dan partisipatoris, terbuka bagi masyarakat. Tata kelola yang baik juga mendorong adanya pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi dan adanya aparatur yang bertanggungjawab, yang profesional dan patuh pada aturan hukum (World Bank dalam Heryanto, 2014).

Tata kelola pemerintah yang baik akan membuat pengelolaan keuangan sesuai dengan perumusan visi, misi, ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf, ada sistem yang mampu menjamin penggunaan sumber daya, adanya tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang baik, adanya evaluasi kinerja program dan kegiatan (Krina, (2003) dalam Sagita et.al (2018). Dengan adanya tata kelola yang sejajar, seimbang dan terpercaya dalam pemerintahan desa maka pemerintah yang demokrasi bias semakin kokoh, *legitimate* dan mampu bekerja secara efektif (Solekhan, 2014:29). Tata kelola pemerintahan yang baik akan berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana Desa ((Ubaidillah dan Dian, 2018).

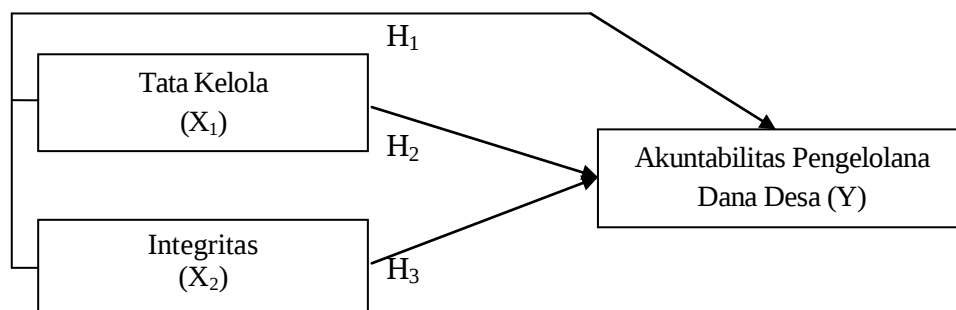
2.3.2 Hubungan Integritas dengan Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Integritas yang baik di tempat kerja mampu melayani proses kerja dengan keyakinan internal yang dapat menyebabkan meningkatnya kinerja. Integritas

membuat pegawai mampu mengeluarkan sikap, perilaku dan tindakan sesuai dengan komitmen dan tanggungjawab. Integritas dapat meningkatkan keteguhan terhadap implementasi kejujuran dan tanggungjawab yang lebih besar, mampu menjaga ucapan dan perbuatan dalam suatu energi positif dan menjadikan diri sebagai orang yang dapat di percaya untuk menjalankan kejujuran dan tanggungjawab (Chaerudin et al., 2020:110).

Berdasarkan uraian kerangka pemikiran maka dapat dirumuskan konsep hubungan antara variabel sebagaimana yang di tunjukkan pada Gambar 2.1

Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara yang perlu di uji kebenarannya. Dengan demikian hipotesis yang dapat diformulasikan dalam penelitian adalah

H₁: Tata kelola dan integritas secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

H₂: Tata kelola berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

H₃: Integritas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan yang akan diteliti, maka penelitian ini termasuk penelitian korelasional, karena tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh tata kelola dan integritas terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian korelasional (*Correlational Studies*) merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara variable bebas dan variable terikat tersebut (Arikunto, 2013:247-248). Adapun variabel dalam penelitian ini adalah variabel bebas berupa tata kelola dan integritas sementara variabel terikat berupa akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3.1.2 Horizon Waktu

Waktu yang digunakan dalam pengumpulan data adalah studi *cross-sectional*. Studi *cross-sectional* adalah sebuah studi dapat dilakukan dengan data hanya sekali dikumpulkan (Sekaran, 2017:177-178). Penelitian ini dilakukan dalam satu waktu tertentu yaitu pada Bulan Agustus 2022 hingga selesai.

3.1.3 Unit Analisis

Unit analisis merujuk pada tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya (Sekaran, 2017:173). Pernyataan masalah dilakukan dapat berfokus pada kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Dengan demikian unit analisis dalam penelitian ini adalah aparatur dan perangkat Gampong di Kecamatan Banda Raya.

3.2 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian ini adalah seluruh aparaturnya dan perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan/Seksi, Kepala Dusun dan Tuha Peut di 10 Gampong Kecamatan Banda Raya yang berjumlah seluruhnya sebanyak 90 sampel atau masing-masing Desa mewakili 9 sampel. Penarikan sampel ini berpedoman pada pendapat Arikunto (2013:134) yang mengatakan jika populasi kurang dari 100 lebih baik semua diambil sebagai sampel sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi. Jumlah sampel penelitian dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1.
Populasi dan Sampel Penelitian

No	URAIAN	Kepala Desa	Sekretaris Gampong	Kaur Keuangan	Kadus	Tuha Peut	Jumlah Sampel
1	Gampong Lam Ara	1	1	1	4	2	9
2	Gampong Lam Pout	1	1	1	4	2	9
3	Gampong Mibo	1	1	1	4	2	9
4	Gampong Lhong Cut	1	1	1	4	2	9
5	Gampong Lhong Raya	1	1	1	4	2	9
6	Gampong Geuceu Komplek	1	1	1	4	2	9
7	Gampong Geuceu Ineum	1	1	1	4	2	9
8	Gampong Kaye Jato	1	1	1	4	2	9
9	Gampong Lamlagang	1	1	1	4	2	9
10	Gampong Peunyerat	1	1	1	4	2	9
	Jumlah	10	10	10	40	20	90

Sumber: Kantor Kecamatan Banda Raya, 2022

Dengan demikian teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik Non Probability. Menurut Sugiyono (2012 : 61) Non Probability sampling adalah teknik yang tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik Non Probability Sampling yang dipilih yaitu dengan Sampling Jenuh (sensus) menurut Menurut Sugiyono (2012: 61-63) yaitu metode penarikan sampel bila semua anggota populasi dijadikan sampel istilah lain dari sampel jenuh adalah sensus.

3.3. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian berupa data primer. Data primer diperoleh dari sumber pertama, misalnya dari individu atau perorangan (Arikunto, 2013:75). Pengumpulan data primer dilakukan pembagian kuesioner. Kuesioner adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari responden (Arikunto, 2013:127). Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini adalah tertutup yaitu pertanyaan yang di rancang berbentuk pilihan yang telah disediakan.

Untuk mengubah data-data kualitatif yang diperoleh dari kuesioner ke bentuk dan kuantitatif maka digunakan skala ukur yaitu skala Likert. Skala likert adalah skala yang dapat digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok terhadap suatu gejala atau fenomena (Arikunto, 2013:66). Kategori pertanyaan yang dirancang dalam kuesioner diberi nilai skor 1-5. Kategori skala interval menurut Arikunto (2013:66) dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Skala Pengukuran

No	Pilihan Jawban	Skor
1	Sangat setuju	5
2	Setuju	4
3	Kurang setuju	3
4	Tidak setuju	2
5	Sangat tidak setuju	1

3.4. Definisi dan Operasionalisasi Variabel

Penelitian ini melibatkan satu variabel terikat yaitu akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa dan dua variabel bebas yaitu tata kelola dan integritas. Karakteristik variabel penelitian dapat dijelaskan pada Tabel 3.3

Tabel 3.3
Definisi dan Operasionalisasi Variabel Penelitian

No	Variabel	Definisi Variabel	Indikator	Skala	Ukuran	Item Pertanyaan
1	Akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y)	kemampuan pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. (Sukasmento dalam Nafidah dan Nur, 2017)	1. Keakuratan dan kelengkapan informasi mengenai sasaran suatu program, 2. Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa, 3. Sistem informasi manajemen dan monitoring hasil, 4. Akses publik pada informasi atas suatu keputusan serta mekanisme pengaduan masyarakat, 5. Kelayakan dan konsistensi dari target operasional maupun prioritas, 6. proses pembuatan sebuah keputusan yang memenuhi standar etika dan nilai yang berlaku	Likert	1-5	B1
						B2
						B3
						B4
						B5
						B6
Independen						
1	Tata kelola (X ₁)	penyelenggaraan pemerintahan yang solid dan bertanggungjawab, efektif dan efisien dengan menjaga keseimbangan sinergi interaksi yang konstruksi antara pemerintah desa dan masyarakat (Solekhan, 2014:82)	Accountability (akuntabilitas)	Likert	1-5	C1
			Transparency (transparansi):			C2
			Participacion (partisipasi):			C3
			Rule of law (Penegakan Hukum)			C4
2	Integritas (X ₂)	konsistensi antara tindakan yang diyakini seseorang. Mengungkapkan maksud, gagasan dan perasaannya	1. Terbuka dan jujur mengenai situasi pekerjaan	Likert	1-5	D1
			2. Bertindak secara konsisten dengan nilai-nilai dan			D2

		secara terbuka dan langsung juga menghargai keterbukaan dan kejujuran orang lain, bahkan dalam situasi sulit sekalipun. (Abdullah, 2019: 5-6)	keyakinan			
			3. Bertindak sesuai dengan nilai-nilai saat hal tersebut sulit dilakukan			D3
			4. Bertindak berdasarkan nilai-nilai sekalipun hal tersebut mengandung biaya dan resiko yang cukup besar			D4

3.5. Metode Analisis Data

Untuk mengetahui pengaruh tata kelola dan akuntabilitas terhadap pengelolaan dana desa maka digunakan analisis regresi linier berganda. Analisis regresi sebagai kajian terhadap hubungan satu variabel yang diterangkan (*the explained variabel*) dengan satu atau dua variabel yang menerangkan (*the explanatory*). Variabel pertama disebut juga sebagai variabel terikat dan variabel kedua disebut juga sebagai variabel bebas. Jika variabel bebas lebih dari satu, maka analisis regresi disebut regresi linear berganda. Disebut berganda karena pengaruh beberapa variabel bebas akan dikenakan kepada variabel tergantung (Sujarweni, 2012:160). Model analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan:

Y = Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa

X₁ = Tata kelola

X₂ = Integritas

β = Koefisien Regresi

α = Intercep

ε = Epsilon

3.6 Pengujian Data

3.6.1 Pengujian Validitas dan Reabilitas

1) Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana suatu alat pengukur itu mengukur apa yang ingin diukur. Susunan kuesioner yang di gunakan dalam penelitian ini harus mengukur apa yang ingin diukurnya. Untuk itu validitas konstruk yaitu kerangka dari suatu konsep dengan cara mencari apa saja yang merupakan konsep tersebut dan menentukan tolak ukurnya (Ancok dalam Singarimbun dan Effendi, 2011:124)

Uji validitas dilakukan dengan mengukur korelasi antar variabel atau item dengan skor total variabel. Uji validitas pada setiap butir pertanyaan/pernyataan dilakukan secara statistik dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coefisient of Corelation* dengan bantuan program SPSS, dengan tingkat signifikansi di bawah 5%. Hasil output SPSS yang menunjukkan nilai Pearson Product Momen Correlation perlu dibandingkan dengan hasil uji Pearson Correlation tabel. Kriteria diterima dan tidaknya suatu data valid atau tidak dalam program SPSS menurut Priyatno (2012:101) ditentukan berdasarkan

1. Nilai r korelasi :

- Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka item dinyatakan valid.
- Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ maka item dinyatakan tidak valid.

2. Nilai signifikansi :

- Jika nilai signifikansi $> \alpha (0,05)$ maka item dinyatakan tidak valid
- Jika nilai signifikansi $< \alpha (0,05)$ maka item dinyatakan valid

2) Pengujian Reliabilitas

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan bila suatu alat pengukur dipakai lebih dari satu kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliabel. Setiap alat pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten (Ancok dalam Singarimbun dan Effendi, 2011:142-144). Uji reliabilitas dilakukan pada masing-masing variabel penelitian. Cara mencari besaran angka reliabilitas dengan menggunakan metode Cronbach's Alpha digunakan rumus berikut (Suliyanto dalam Wibowo, 2012:52). Menurut Sekaran dalam Wibowo (2012:53) kriteria penilaian uji reliabilitas jika reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan diatas 0,8 adalah baik.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

1) Uji Normalitas

Pengujian normalitas digunakan untuk mengetahui apakah distribusi data penelitian masing-masing variabel telah menyebar secara normal atau tidak, hal ini dapat dilakukan dengan melihat sebaran *standarized* pada kurva *P-P* plots dan Histogram, bila *standarized residual* berada pada kisaran garis normal maka data mempunyai distribusi normal (Ghozali, 2011:120).

2) Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari *residual* satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut

homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heterokedastisitas (Ghozali, 2011:139). Salah satu cara yang digunakan dalam mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas adalah dengan cara menggunakan uji *Glejser* yaitu dengan meregres nilai *absolute residual* terhadap variabel bebas.

3) Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol (Ghozali, 2011:105). Untuk menguji adanya multikolinieritas dapat dilakukan dengan menganalisis korelasi antar variabel dan perhitungan nilai toleransi serta VIF (*Variance Inflation Factor*). Multikolinieritas terjadi jika nilai tolerance lebih kecil dari 0,1 yang berarti tidak ada korelasi antar variabel bebas yang nilainya lebih dari 95%. Nilai VIF lebih besar dari 10, apabila VIF kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa variabel bebas yang digunakan dalam model adalah dapat dipercaya dan objektif.

3.7 Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga karena masih harus dibuktikan kebenarannya. Dalam penelitian ini Pengujian hipotesis dilakukan secara simultan dan secara parsial menggunakan *parameter regresi linier* berganda sebagai berikut:

3.7.1 Pengujian Secara Simultan

$H_{01}: \beta_1 = \beta_2 = 0$; maka H_{01} diterima dan H_{a1} di tolak artinya tata kelola dan integritas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

$H_{a1}: \beta_1 = \beta_2 \neq 0$ ($\beta_i \neq 0$); maka H_{a1} diterima dan H_{01} di tolak artinya tata kelola dan integritas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

3.7.2 Pengujian Secara Parsial

$H_{02}: \beta_1 = 0$; maka H_{02} diterima dan H_{a2} artinya tata kelola tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

$H_{a2}: \beta_1 \neq 0$; maka H_{a2} diterima dan H_{02} di tolak artinya tata kelola berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

$H_{03}: \beta_2 = 0$; maka H_{03} diterima dan H_{a3} artinya integritas tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

$H_{a3}: \beta_2 \neq 0$; maka H_{a3} diterima dan H_3 di tolak artinya integritas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Banda Raya

Kecamatan Banda Raya adalah salah satu dari 8 (delapan) pemerintah Kecamatan di Kota Banda Aceh dengan luas wilayah 478,90 Ha. Kecamatan Banda Raya membentang dari Areal Terminal Batoh yang berada di sebelah Timur hingga ke Jln. Sudirman yang berbatasan dengan Desa Geuceu Meunara di sebelah Barat. Di sebelah Selatan Kecamatan Banda Raya berbatasan dengan Kecamatan Banda Raya tepatnya Pasar Keutapang membentang hingga ke Timur yang berbatasan dengan Kecamatan Baiturrahman tepatnya jalan lintas yang menghubungkan Desa Lamlagang dengan Desa Neusu Aceh. Kecamatan Banda Raya membawahi 10 Gampong/Kelurahan. Adapun Pemerintah Gampong di Kecamatan Banda Raya terdiri dari:

1. Gampong Lam Ara
2. Gampong Lam Pout
3. Gampong Mibo
4. Gampong Lhong Cut
5. Gampong Lhong Raya
6. Gampong Geuceu Komplek
7. Gampong Geuceu Ineum
8. Gampong Kaye Jato
9. Gampong Lamlagang
10. Gampong Peunyerat

Camat sebagai kepala pemerintahan kecamatan adalah pemimpin di bidang pemerintahan dalam arti melaksanakan administrasi pemerintahan kecamatan, melaksanakan pembinaan terhadap 42 Desa yang berada di bawah koordinasinya, menyelenggarakan keuangan daerah dan menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut kepada Wali Kota Banda Aceh.

4.2 Karakteristik Responden

Karakteristik responden dalam penelitian ini adalah keadaan atau ciri-ciri aparatur dan perangkat Desa yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya yang terdiri dari Geuchik, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, Kepala Dusun, dan Tuha Peut yang berjumlah seluruhnya sebanyak 90 orang. Mereka memiliki tingkat umur, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan masa kerja yang berbeda. Karakteristik aparatur dan perangkat Desa di Kecamatan Banda Raya dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Karakteristik Responden

No	Karakteristik		Frekuensi	Persentase
1	Umur	31-35 tahun	2	2.2
		35-40 tahun	24	26.7
		41-45 tahun	37	41.1
		46-50 tahun	27	30.0
		Total	90	100,0
2	Kelamin	Laki-laki	81	90.0
		Perempuan	9	10.0
		Total	90	100,0
3	Pendidikan	SLTA	32	35.6
		S1	58	64.4
		Total	90	100,0
4	Masa Kerja	< 10 tahun	53	58.9
		10-15 tahun	37	41.1
		Total	90	100,0

Sumber :Data Primer (diolah), 2022

Tabel 4.1 dapat dijelaskan sebahagian besar atau 41,1% dari jumlah aparatur dan perangkat Desa yang terdata di Kecamatan Banda Raya berumur antara 41-45 tahun. Ada 30% dari jumlah aparatur dan perangkat Desa dengan umur antara 46-50 tahun dan 2,2% dengan umur antara 31-35 tahun. Selebihnya 28,9% dari jumlah aparatur dan perangkat Desa yang terdata dengan umur antara 31–35 tahun. Aparatur dan perangkat Desa yang terdata di Kecamatan Banda Raya sebahagian besar atau 90,0% berjenis kelamin laki-laki, selebihnya 10,0% berjenis kelamin perempuan.

Dilihat dari tingkat pendidikan, sebahagian besar atau 64,4% dari jumlah aparatur dan perangkat Desa yang terdata di Kecamatan Banda Raya dengan latar belakang pendidikan S1. Ada 35,6% dari jumlah aparatur dan perangkat Desa yang terdata dengan tingkat pendidikan SLTA. Sebahagian besar atau 58,9% dari jumlah aparatur dan perangkat Desa yang terdata di Kecamatan Banda Raya dengan masa kerja kurang dari 10 tahun. Ada 41,1% dari jumlah dari jumlah aparatur dan perangkat Desa yang terdata dengan masa kerja antara 10-15 tahun.

4.3 Deeskriptif Variabel Penelitian

4.3.1 Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa

Variabel penelitian akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2
Gambaran Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
di Kecamatan Banda Raya

No	Akuntabilitas	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Rata-rata
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Perangkat desa dapat memberikan informasi mengenai dana Desa jika diminta secara akurat dan lengkap.	0	0,0	0	0,0	33	40,7	48	59,3	0	0,0	3.583
2.	Perangkat desa selalu menyebar luaskan informasi penggunaan dana Desa untuk setiap program kegiatan.	0	0,0	0	0,0	36	44,4	39	48,1	6	7,4	3,450

3.	Dana desa didukung oleh sistem informasi dan komunikasi (Laporan) yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penggunaan dana desa.	0	0,0	0	0,0	39	48,1	42	51,9	0	0,0	3,367
4.	Masyarakat memiliki akses informasi atas suatu keputusan aparatur desa serta adanya tempat pengaduan atas setiap adanya penyimpangan.	0	0,0	0	0,0	42	51,9	33	40,7	6	7,4	3,100
5.	Rencana kerja dalam penggunaan dana desa telah disusun sesuai program prioritas pemerintah.	0	0,0	2	2,5	40	49,4	39	48,1	0	0,0	3,667
6.	Adanya standar dan nilai yang disepakati bersama sehingga dengan mudah di ketahui adanya penyimpangan.	0	0,0	0	0,0	39	48,1	39	48,1	3	3,7	3,750
Rata-rata		3,486										

Sumber : Data Primer (diolah), 2022

Tabel 4,6 menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya masih relatif kurang baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,486 unit skala likert. Nilai tersebut masuk dalam kategori nilai 3 (skor untuk pilihan jawaban kurang setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah aparatur dan perangkat desa yang terdata menjawab kurang setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang akuntabilitas tersebut. Kalaupun ada dari aparatur dan perangkat desa yang memilih alternatif pilihan jawaban setuju, tidak setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Proses pembuatan sebuah keputusan yang memenuhi standar etika dan nilai yang berlaku menjadi indikator terbaik dari akuntabilitas pengelolana dana desa di Kecamatan Banda Raya dengan nilai jawaban 3,750 unit skala likert. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah aparatur dan perangkat desa yang terdata menjawab setuju jika proses pembuatan sebuah keputusan dalam pengelolaan dana desa telah memenuhi standar etika dan nilai yang berlaku.

Sementara akses publik pada informasi sebagai suatu keputusan serta

mekanisme pengaduan masyarakat, menjadi indikator akuntabilitas yang masih kurang baik di Kecamatan Banda Raya dengan nilai jawaban 3,100 unit skala likert. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya dan mendekati 3 (skor untuk pilihan jawaban kurang setuju). Kondisi ini menjelaskan bahwa sebahagian besar dari jumlah aparatur dan perangkat desa yang terdata menjawab kurang setuju jika masyarakat memiliki akses informasi atas suatu keputusan yang dibuat aparatur desa serta adanya tempat pengaduan atas setiap adanya penyimpangan.

4.3.2 Variabel Kualitas Tata Kelola

Variabel penelitian kualitas tata pengelolana dana desa di Kecamatan Banda Raya dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3
Gambaran Tata Kelola Pengelolaan Dana Desa
di Kecamatan Banda Raya

No	Tata kelola	Sgt Tdl Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Rata-rata
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Penggunaan dana Desa untuk pengembangan sarana- dan prasarana Desa dapat dipertanggungjawabkan secara objektif berdasarkan laporan dan bukti-bukti.	0	0,0	0	0,0	33	40,7	27	33,3	21	25,9	3.756
2.	Informasi program kerja/kegiatan yang menggunakan dana Desa telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.	0	0,0	0	0,0	30	37,0	42	51,9	9	11,1	3.322
3.	Program kerja/kegiatan yang menggunakan dana Desa telah mengikutsertakan masyarakat dalam setiap tahap mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.	0	0,0	0	0,0	30	37,0	51	63,0	0	0,0	3.522
4.	Penyimpangan dana Desa untuk pengembangan sarana- dan prasarana Desa harus di tindak lanjuti secara cepat melalui lembaga hukum.	0	0,0	9	11,1	36	44,4	36	44,4	0	0,0	3.622
Rata-rata		3,555										

Sumber : Data Primer (diolah), 2022

Tabel 4,4 menjelaskan tata kelola pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,555 unit skala likert. Nilai tersebut masuk dalam nilai kategori 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah aparatur dan perangkat desa yang terdata menjawab kurang setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang tata kelola tersebut. Kalaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban setuju, tidak setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Prinsip *accountability* (akuntabilitas) menjadi indikator kualitas tata kelola dengan nilai jawaban tertinggi dalam pengelolana dana desa di Kecamatan Banda Raya dengan nilai jawaban 3,756 unit skala likert. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan mendekati 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah aparatur dan perangkat desa yang terdata di Kecamatan Banda Aceh menjawab setuju jika penggunaan dana desa untuk pengembangan sarana dan prasarana desa telah dapat dipertanggungjawabkan secara objektif berdasarkan laporan dan bukti-bukti.

Sementara *rule of law* (penegakan hukum) menjadi indikator kualitas tata kelola dengan nilai jawaban terendah yaitu 3,322 unit skala likert. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya dan mendekati 3 (skor untuk pilihan jawaban kurang setuju). Kondisi ini menandakan bahwa sebahagian besar dari jumlah aparatur dan perangkat desa yang terdata menjawab kurang setuju jika penyimpangan dana desa untuk pengembangan sarana dan prasarana desa telah di tindak lanjuti secara cepat melalui lembaga hukum.

4.3.3 Variabel Integritas

Variabel penelitian integritas dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.4

Tabel 4.4
Gambaran Integritas Dalam Pengelolaan Keuangan
Dana Desa di Kecamatan Banda Raya

No	Integritas	Sgt Tdk Setuju		Tdk Setuju		Krg setuju		Setuju		Sgt Setuju		Rata-rata
		Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	Fr	%	
1.	Aparatur desa selalu terbuka dan jujur mengenai segala sesuatu yang menyangkut dengan penggunaan dana desa	0	0,0	0	0,0	33	40,7	27	33,3	21	25,9	3.456
2.	Aparatur desa selalu bertindak secara konsisten (tidak berubah-ubah) walaupun proses pekerjaannya lama dan adanya tekanan dari pihak lain.	0	0,0	0	0,0	30	37,0	42	51,9	9	11,1	3.589
3.	Dalam bekerja Aparatur desa selalu bertindak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku walaupun ada situasi tertentu yang terbuka untuk membuat curang.	0	0,0	0	0,0	30	37,0	51	63,0	0	0,0	3.533
4.	Aparatur desa selalu melakukan suatu tugas berdasarkan tanggungjawab walaupun tugas tersebut memerlukan kemampuan ekstra dan pengorbanan waktu	0	0,0	9	11,1	36	44,4	36	44,4	0	0,0	3.556
Rata-rata		3,533										

Sumber : Data Primer (diolah), 2022

Tabel 4.4 menjelaskan integritas aparatur dan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya sudah relatif baik dengan nilai jawaban rata-rata 3,533 unit skala likert. Nilai tersebut masuk dalam nilai kategori 4 (skor untuk pilihan setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah aparatur dan perangkat desa yang terdata menjawab setuju untuk sejumlah pertanyaan tentang integritas tersebut. Walaupun ada dari mereka yang memilih alternatif pilihan jawaban setuju, tidak setuju dan sangat setuju hanya sebahagian kecil.

Bertindak secara konsisten dengan nilai-nilai dan keyakinan menjadi indikator terbaik dari integritas aparatur dan perangkat desa dalam pengelolaan dana desa di Kecamatan Banda Raya dengan nilai jawaban 3,583 unit skala likert. Nilai tersebut lebih tinggi dari nilai indikator lainnya dan masuk dalam kategori 4 (skor untuk pilihan jawaban setuju). Kondisi ini menandakan sebahagian besar dari jumlah aparatur dan perangkat desa yang terdata di Kecamatan Banda Raya menjawab setuju jika aparatur desa selalu bertindak secara konsisten (tidak berubah-ubah) walaupun proses pekerjaannya lama dan adanya tekanan dari pihak lain.

Sementara terbuka dan jujur mengenai situasi pekerjaan menjadi indikator integritas aparatur dan perangkat desa yang terbaik di Kecamatan Banda Raya dengan nilai jawaban 3,456 unit skala likert. Nilai tersebut lebih rendah dari nilai indikator lainnya dan masuk dalam kategori 3 (skor untuk pilihan jawaban kurang setuju). Kondisi ini menandakan bahwa sebahagian besar dari jumlah perangkat Desa yang terdata menjawab kurang setuju jika aparatur desa selalu terbuka dan jujur mengenai segala sesuatu yang menyangkut dengan penggunaan dana desa.

4.4 Pengujian Instrumen Data

4.4.1 Pengujian Validitas dan Reliabilitas

a) Pengujian Validitas

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian merupakan hasil dari seperangkat set indikator dari hasil pembagian kuesioner sehingga data yang dihasilkan tersebut perlu dilakukan uji kebenaran atau validitas. Pengujian validitas data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengkorelasikan skor item tiap pertanyaan dan skor rata-rata untuk seluruh pertanyaan yaitu dengan menggunakan uji *Pearson Product-Moment Coeffisient of Corelation*. Pengukuran nilai tersebut

dihitung dengan bantuan perangkat program SPSS. Nilai korelasi hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan nilai kritis korelasi *product moment* pada tingkat signifikansi 5%. Nilai *product moment* pada df 90 dan tingkat kesalahan 5% adalah sebesar 0,207. Lebih jelas hasil uji validitas dapat dilihat Tabel 4.5.

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas

Indikator		Koefisien Korelasi	Nilai Kritis r N = 90	Keterangan
B1	Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y)	0,726	0,207	Valid
B2		0,766	0,207	Valid
B3		0,789	0,207	Valid
B4		0,500	0,207	Valid
B5		0,905	0,207	Valid
B6		0,836	0,207	Valid
C1	Tata kelola (X ₁)	0,509	0,207	Valid
C2		0,533	0,207	Valid
C3		0,837	0,207	Valid
C4		0,673	0,207	Valid
D1	Integritas (X ₂)	0,617	0,207	Valid
D2		0,678	0,207	Valid
D3		0,864	0,207	Valid
D4		0,712	0,207	Valid

Sumber : Data Primer (diolah), 2022

Tabel 4.5 di atas menunjukkan bahwa data primer yang digunakan untuk variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa yang terbentuk dari nilai pertanyaan B1 sampai dengan B6, variabel tata kelola yang terbentuk dari nilai pertanyaan C1 sampai dengan C4, dan variabel integritas yang terbentuk dari nilai pertanyaan D1 sampai dengan D4 seluruhnya memiliki koefisien korelasi r hitung > nilai r tabel *product-moment* pada *level of significant* 5% (0,207) sebagaimana terlihat pada Lampiran 7. Dengan demikian seluruh butir indikator ukur yang digunakan dalam pertanyaan kuesioner tersebut dinyatakan valid dan signifikan sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.

b) Pengujian Reliabilitas

Penggunaan item-item pertanyaan untuk data penelitian yang akan digunakan lebih lanjut dalam penelitian ini mensyaratkan adanya suatu pengujian konsistensi melalui uji reliabilitas (kehandalan), sehingga data yang digunakan untuk analisis benar-benar dapat dipercaya. Uji kehandalan item pertanyaan pada kuesioner dilakukan dengan menggunakan uji reliabilitas internal dari nilai Alpha. Uji ini hanya dilakukan satu kali pada sekelompok responden pada masing-masing variabel. Ukuran reliabilitas dianggap handal berdasarkan pada koefisien alpha 0,90 (Malhotra, 2013:305). Jika derajat kehandalan data lebih besar dari koefisien alpha (α), maka hasil pengukuran dapat dipertimbangkan sebagai alat ukur dengan tingkat ketelitian dan konsistensi pemikiran yang baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat Tabel 4.6.

Tabel. 4.6
Hasil Uji Reliabilitas

No	Variabel	Indikator Pertanyaan	Nilai Alpha	Keterangan
1	Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa(Y)	B1 s/d B6	0,852	Handal
2	Tata kelola (X_1)	C1 s/d C4	0,813	Handal
3	Integritas (X_2)	D1 s/d D4	0,838	Handal

Sumber : Data Primer (diolah), 2022

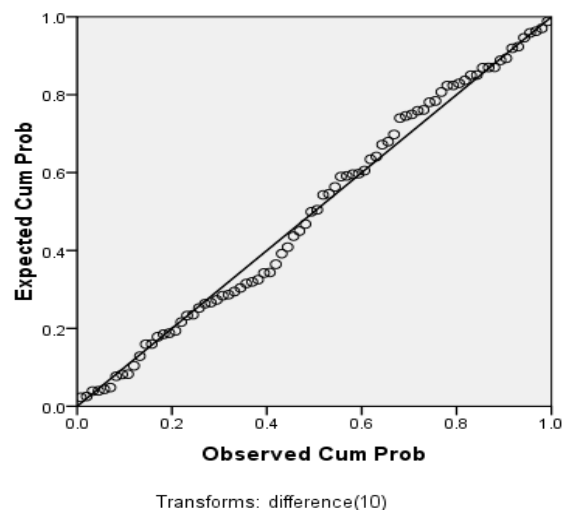
Tabel 4.3 dapat dijelaskan hasil uji reliabilitas terhadap 6 atribut pertanyaan yang digunakan masing-masing untuk pengumpulan data variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa, tata kelola dan integritas diperoleh nilai alpha masing-masing sebesar 0,852, 0,813 dan 0,838. Dengan demikian alat ukur yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini telah dapat terpercaya atau memenuhi kredibilitas *Cronbach's Alpha* dengan nilai alpha lebih dari 0,60.

4.4.2 Pengujian Uji Asumsi Klasik

a) Pengujian Normalitas.

Baik data skala variabel tata kelola, integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa harus mencerminkan data skala yang bebas dari pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji apakah distribusi nilai-nilai sampel pada variabel penelitian sesuai dengan distribusi teoritis maka digunakan uji normalitas dengan menggunakan gambar normal P –P Plot. Gambar ini menunjukkan sebaran *standarrized residual* berada dalam kisaran garis diagonal seperti terlihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut:

Gambar 4.1
Grafik P-P Plot Uji Normalitas



Dari 90 data empiris yang digunakan dalam mengukur variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa mengikuti garis diagonalnya atau adanya pola yang non linier dan independen. Begitu juga untuk variabel tata kelola dan integritas seperti yang diperlihatkan dalam Lampiran, seluruhnya terdistribusi secara normal.

b) Pengujian Multikolinieritas

Multikolinearitas adalah suatu kondisi hubungan linear antara variabel independen yang satu yaitu tata kelola dengan yang lainnya yaitu integritas dalam model regresi sangat dominan terjadi sehingga mempengaruhi kebenaran nilai prediksi terhadap variabel dependen. Cara untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat pada Variance Inflation Factor (VIF). Batas VIF yang ditetapkan adalah 5. Jika nilai VIF di atas 5 maka terjadi multikolinearitas. Uji multikolinearitas dapat dijelaskan pada Tabel 4.4

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinearitas

No	Variabel	Tolerance	Nilai VIF	Keterangan
1	Tata kelola (X_1)	0,237	4,213	Non Multikolinieritas
2	Integritas (X_2)	0,237	4,213	Non Multikolinieritas

Sumber : Data Primer (diolah), 2022

Hasil pengujian multikolinieritas di atas menunjukkan nilai VIF dari dua variabel bebas yang terlibat dalam model analisis yaitu tata kelola (X_1) dan integritas (X_2) masing-masing adalah 4,213 atau $< 5,00$ sehingga dapat diartikan tidak terjadi gejala multikolinieritas antara variabel bebas tersebut. Dengan demikian model regresi pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam penelitian ini masing-masing diprediksi secara terpisah oleh kekuatan masing-masing variabel sehingga sudah dapat dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan.

c) Pengujian Heteroskedastisitas

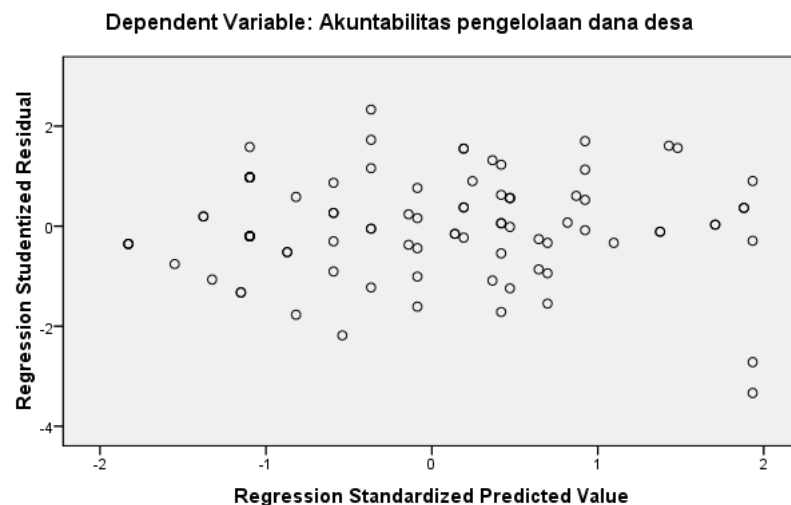
Asumsi dari penggunaan data skala dalam model regresi linier berpotensi terjadinya gangguan (*disturbance*) U_1 yang di kenal dengan gangguan Homoscedastic. Homoscedastic terjadi jika data dari variabel tata kelola (X_1),

integritas (X_2) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y) mempunyai varian yang sama, sehingga menyebabkan tingginya tingkat kesalahan. Alat untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas adalah dengan metode chart (diagram scatterplot), dengan dasar pemikiran bahwa :

1. Jika ada pola tertentu terdaftar titik-titik (point-point), yang ada membentuk suatu pola tertentu yang beraturan (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka terjadi heteroskedastisitas.
2. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik (point-point) menyebar keatas dan dibawah 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Output SPSS hasil uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada Gambar 4.2

Gambar 4.2
Scatterplot Uji Heteroskedastisiats



Berdasarkan chart diatas tidak memperlihatkan pola data bergelombang, melebar kemudian menyempit yang membentuk pola tertentu yang teratur. Dengan demikian hubungan tersebut tidak terjadi heteroskesdastisitas.

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Analisis Regresi Linier Berganda Pengaruh Tata Kelola dan Integritas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa.

Akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya terjadi perubahan setiap saat akibat berubahnya berbagai faktor termasuk didalamnya tata kelola dan integritas serta variabel lainnya yang tidak terlibat dalam model analisis ini. Pengaruh variabel bebas dan terikat dalam model analisis ini dapat dibuktikan melalui formula regresi berganda (*multiple regression*). Formulasi ini bertujuan untuk memprediksi sejauhmana tingkat kenaikan skala likert dari 2 (dua) variabel bebas yang digunakan tersebut dalam mempengaruhi terhadap kenaikan skala variabel terikat pada tingkat kesalahan tertentu (signifikansi) atau dimana pengaruh antar variabel tersebut benar-benar nyata (signifikan).

Dengan format ini maka variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y) dalam model ini disebut sebagai variabel terikat yang dipengaruhi oleh variabel bebas meliputi variabel tata kelola (X_1) dan integritas (X_2). Hasil regresi linier berganda dapat dilihat pada Tabel 4.8

Tabel 4.8
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,576	0,206		2,791	0,006
	Tata kelola	0,420	0,119	0,425	3,528	0,001
	Integritas	0,411	0,112	0,440	3,658	0,000

Sumber: Data Primer (diolah), 2022

4.5.1 Koefisien Regresi (B)

Berdasarkan Tabel 4.8 dapat dibuat persamaan linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 0,576 + 0,420X_1 + 0,411X_2 + \varepsilon$$

Nilai konstanta akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y) sebesar 0,576 dapat diartikan bahwa jika tata kelola (X_1) tidak diterapkan atau integritas (X_2) tidak dilibatkan dalam model analisis, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (Y) di Kecamatan Banda Raya secara konstan berada pada posisi 0,576 unit skala likert. Nilai tersebut masih relatif kecil karena berada di bawah nilai 1.

Koefisien regresi pengaruh tata kelola sebesar 0,420 unit skala likert, menjelaskan setiap meningkatnya 1 (satu) satuan tata kelola pemerintah desa di Kecamatan Banda Raya maka akan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya sebesar 0,420 satuan. Dengan demikian jika tata kelola di Kecamatan Banda Raya dapat ditingkatkan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya akan semakin baik. Kondisi ini disebabkan dengan tata kelola yang baik maka pemerintah juga akan memiliki organisasi pemerintah Desa yang kuat dan partisipatoris, terbuka bagi masyarakat. Tata kelola yang baik mendorong adanya pembuatan kebijakan yang dapat diprediksi dan adanya aparatur yang bertanggungjawab, yang profesional dan patuh pada aturan hukum (World Bank dalam Heryanto, 2014). Tata kelola pemerintah desa yang baik akan membuat pengelolaan keuangan dana desa akan sesuai dengan perumusan visi, misi, ada komitmen dari pimpinan dan seluruh staf, ada sistem yang mampu menjamin penggunaan sumber daya, adanya tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang baik, adanya evaluasi kinerja program dan kegiatan (Krina, (2003) dalam Sagita et.al (2018).

Koefisien regresi pengaruh integritas aparatur dan perangkat desa adalah sebesar 0,411 unit skala likert, menjelaskan setiap meningkatnya integritas aparatur dan perangkat desa sebesar 1 (satu) satuan maka akan dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya sebesar 0,411 satuan. Dengan demikian jika integritas aparatur dan perangkat desa di Kecamatan Banda Raya dapat ditingkatkan maka akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan ini akan semakin baik. Kondisi ini disebabkan karena dengan integritas yang baik di tempat kerja mampu melayani proses kerja dengan keyakinan internal yang dapat menyebabkan meningkatnya kinerja aparatur. Integritas membuat aparatur dan perangkat desa mampu mengeluarkan sikap, perilaku dan tindakan sesuai dengan komitmen dan tanggungjawab. Integritas dapat meningkatkan keteguhan aparatur dan perangkat desa terhadap implementasi kejujuran dan tanggungjawab yang lebih besar, mampu menjaga ucapan dan perbuatan dalam suatu energi positif dan menjadikan diri sebagai orang yang dapat di percaya untuk menjalankan kejujuran dan tanggungjawab (Chaerudin et al., 2020:110).

4.5.2 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil menunjukkan bahwa kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen amat terbatas (Ghozali, 2016). Hubungan satu variabel dengan variabel lainnya dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Tabel 4.9
Uji Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0,837	0,701	0,694

Sumber: Data Primer (diolah), 2022

Nilai R sebesar 0,837 menjelaskan terdapat hubungan yang positif antar variabel bebas (tata kelola (X_1) dan integritas (X_2)) dengan akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya (Y), hubungan tersebut tergolong sangat kuat dengan koefisien keeratan hubungan 0,837 atau 83,7% atau masuk dalam kategori 0,80 – 100 (Sugiyono, 2017:250).

Nilai (R^2) sebesar sebesar 0,701 atau 70,1% menjelaskan, kemampuan variabel tata kelola dan integritas dalam menjelaskan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya adalah sebesar 0,701 atau 70,1%. Sementara nilai sisa sebesar 0,299 atau 29,9% dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini seperti pengawasan dan pemeriksaan, sistem informasi serta faktor lainnya.

4.1.5 Hasil Pengujian Hipotesis

4.1.5.1 Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

H_1 : Nilai $\beta_1 = 0,420$ dan $\beta_2 = 0,411$, berdasarkan nilai tersebut maka $\beta_1 = \beta_2 \neq 0$ ($\beta_i \neq 0$), sehingga dapat diuraikan bahwa hipotesis nul (H_0) di tolak, dan hipotesis alternatif H_a di terima, artinya tata kelola dan integritas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya . Dengan demikian hasil penelitian ini terdukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ubaidillah dan Dian (2018) tentang pengaruh tata kelola dan integritas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini berhasil

mengemukakan bahwa tata kelola dan integritas secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

4.1.5.2 Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

H₂: Nilai $\beta_1 = 0,420$, berdasarkan nilai tersebut maka $\beta_2 \neq 0$ sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis nul (H₀) di tolak, dan hipotesis alternatif H_a di terima, artinya tata kelola berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya. Dengan demikian hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ubaidillah dan Dian (2018) tentang pengaruh tata kelola dan integritas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini berhasil mengemukakan bahwa tata kelola berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

4.1.5.3 Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

H₃: Nilai $\beta_2 = 0,411$, berdasarkan nilai tersebut maka $\beta_3 \neq 0$ sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa hipotesis nul (H₀) di tolak, dan hipotesis alternatif H_a di terima, artinya integritas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya. Dengan demikian hasil penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Ubaidillah dan Dian (2018) tentang pengaruh tata kelola dan integritas terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini berhasil mengemukakan bahwa tata kelola dan integritas secara simultan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Tata kelola dan integritas secara bersama-sama berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya.
2. Tata kelola berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,420 satuan.
3. Integritas berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Banda Raya dengan nilai koefisien regresi sebesar 0,411 satuan.

5.2 Saran-saran

Berdasarkan kelemahan di atas maka dapat disarankan beberapa saran antara lain:

1. Pemerintah Desa di Kecamatan Banda Raya perlu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan akses informasi yang lebih terbuka atas suatu keputusan yang telah dibuat aparatur desa serta adanya tempat pengaduan atas setiap adanya penyimpangan.
2. Pemerintah Desa di Kecamatan Banda Raya perlu memperkuat tata kelola pemerintah desa dengan publikasi informasi program kerja/kegiatan yang menggunakan dana Desa secara luas kepada masyarakat .
3. Pemerintah Desa di Kecamatan Banda Raya perlu meningkatkan integritas aparatur dan perangkat desa dengan sikap yang terbuka dan jujur mengenai segala sesuatu yang menyangkut dengan penggunaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Burhanuddin (2016) *Budaya Kerja Perbankan: jalan Lurus Menuju Integritas* Jakarta: LP3ES
- Adisasmita Rahardjo (2011) *Manajemen Keuangan Daerah*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Adiwirya, Muhammad Firdiansyah dan I Putu Sudana (2015) Akuntabilitas, Transparansi, Dan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Denpasar *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol 11 No 2* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana, Bali
- Ardiani, Susi (2019) Pengaruh Integritas Terhadap Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Dikecamatan Rambutan Kabupaten Banyuasin) *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, Vol.3 No.2, Hal 159-170 Program Studi Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian*. Reneka Cipta, Jakarta.
- Astuti, Titiek Puji dan Yulianto (2016) Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 *Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, Vol 1 No 1 Universitas Setia Budi Surakarta
- Berdesa. Com “Ini Dia 12 Modus Korupsi Dana Desa Versi ICW” (<https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:i2c6XXb5IFYJ:https://www.berdesa.com/12-modus-korupsi-dana-desa-versi-icw/+&cd=3&hl=id&ct=clnk&gl=id>, diakses 15 Desember 2020)
- Caro, Cornolius Complek (2015) Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Perongkan Kecamatan Sekadau Kabupaten Sekadau. *Journal Ilmu Sosial Program Studi Ilmu Pemerintah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Universitas Tanjung Pura. Kalimantan Barat
- Chaerudin, Ali., Inta Hartaningtyas Rani & Velma Alicia · (2020) *Sumber Daya Manusia : Pilar Utama Kegiatan Operasional Organisasi*. Sukabumi: Jejak.
- Chandra, Eka Robert (2016) Penerapan Prinsip Good Governance Dalam Pelaksanaan Pelayanan Publik Di Kantor Camat Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat *eJournal Ilmu Pemerintahan Vol 4 No 1*, FISIP-UNMUL.
- Darmanto dan Nur (2019) *Integritas Guru: Implementasi Pilar-pilar Pendidikan*. Malang: Media Nusa Kreatif
- Ekasari, Ratna., *Asas Model Efektivitas Dana Desa untuk Menilai Kinerja Desa Melalui Pemberdayaan Ekonomi* (Malang: AE Publishing 2020)

- Fauzan (2013) Pengaruh Good Governance Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Perbanas *Accounting Conference - 2103* Universitas Kanjuruhan Malang.
- Ghozali, Imam (2011) *Aplikasi Multivariate Dengan SPSS*, Penerbit Universitas Dipanegoro, Semarang.
- Harnovinsah., Ana Sopanah., dan Rida Pettiwi Sari, (2020) *Bunga Rampai Akuntansi Publik: Isu Kontemporer Akuntansi Publik*; Surabaya: Scopindo Media Pustaka
- Hasniati (2016) Model Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Hasniati. *Jurnal Analisis dan Kebijakan Pelayanan Publik Vol 2 Nomor 1* Departemen Ilmu Administrasi, Universitas Hasanuddin
- Halim, Abdul, dan Muhammad, S. K. (2012). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi. Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Heryanto, Yanto (2014) Implementasi Good Governance Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Di Indonesia *Jurnal Logika, Volume XII, No 3* Universitas Swadaya Gunung Jati
- Julianto, Pagaluyon Adi (2017) Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kecamatan Sembakung Kabupaten Nunukan Studi Komparatif Antara Desa Mambulu Dan Desa *eJournal Pemerintahan Integratif Vol 5 No 4* Program S1 Pemerintahan Integratif, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.
- Kirana, Chandra dan Elan Eriswanto (2018) Pengaruh Tata Kelola Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi Kasus Pada Desa-Desa di Kecamatan Kebonpedes Kabupaten Sukabumi) *Jurnal Ilmiah Ilmu Ekonomi Vol.6 Edisi 12*, hal 2015-2011 Universitas Muhammadiyah Sukabumi.
- Mahardi, Dedi (2017) *Integritas Bangsa: Dulu Kini dan Nanti*. Jakarta: Elex Media Cuputindo
- Mahmudi (2013) *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mardiasmo, (2012), *Akuntansi Sektor Publik*, ANDI, Yogyakarta.
- Maghviroh, Rovila E (2019) Peningkatan Tata Kelola Yang Baik Dan Daya Saing Menuju Desa Sejahtera. *Artikel Ilmiah Ikatan Akuntan Indonesia Wilayah Jawa Timur*.
- Nafidah, Lina Nasehatun dan Nur Anisa (2017) Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang *Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 10 Nomor 2* STIE PGRI Dewantara Jombang

- Novitaningrum, Badzlina Daroyani (2014) Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Kota Surabaya Secara Elektronik *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik Vol 2 No1* Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Erlangga.
- Nugroho, Riant dan Firre An Suprpto (2021) *Manajemen keuangan desa: Bagian 3 Pelaksanaan Keuangan Desa*. Jakarta: Elex Media Komputindo
- Nurcholis, Hanif (2011) *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta : penerbit ERLANGGA.
- Nubatonis, Sondil E., Sugeng Rusmiwari., dan Son Suwasono (2014) Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pelayanan Publik JISIP: *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. 3, No. 1* Program Studi Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadew
- Priyatno, Duwi (2012) *Teknik Mudah dan Cepat Melakukan Analisis Data Penelitian dengan SPSS dan Tanya Jawab*. Yogyakarta: Gaya Media.
- RaharjoMuhammad Muiz (2021) *Tata Kelola Pemrintah Desa*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Rani, Falentina K. G., Linda Lambey., dan Sherly Pinatik (2018) Pengaruh Integritas, Kompetensi, Dan Profesionalisme Terhadap Produktivitas Kerja Karyawan Bagian Akuntansi Pada Pt. Bank Mandiri (Persero) Tbk Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern Vol 13 No 3, Hal 41-51*.
- Republik, Indonesia *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Republik, Indonesia *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*
- Republik, Indonesia, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Rosielita, Febby; Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan Ni Kadek Sinarwati, (2017) Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng) *Jurnal Ilmiah mahasiswa Akuntansi Vol 8, No 2*

- Safitri, Cica Dwi Indria (2020) Pengaruh Integritas, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Se-Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo) *Jurnal Ilmiah Vol 2 No 2 Hal 11-22*
- Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi (2011) *Metode Penelitian Survei*, Pustaka LP3ES, Jakarta
- Setiyono, Budi (2014) *Pemerintahan dan Manajemen Sektor Publik*, Yogyakarta: CAPS
- Solekhan, Moch (2014) *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Malang : Setara. Press.
- Susanto, Dwi., Dian Anggraeni Yusuf., dan Yunaita Rachmawati (2015) Pengaruh Good Governance Terhadap Kualitas Pemberian Layanan Publik *Jurnal Paradigma Vol. 12, No. 02*, Universitas Islam Batik Surakarta.
- Sujarweni, V dan Poly Endrayanto. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Uar, Aty (2016) Pengaruh Pelaksanaan Prinsip-Prinsip Good Governance Terhadap Kinerja Pelayanan Publik Pada Badan Pertahanan Nasional (BPN) Kota Ambon Fakultas Ilmu Sosial, *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Vol 6 No 1* Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Darussalam Ambon.
- Ubaidillah, Moh. dan Dian Arumsari (2018) Pengaruh Tata Kelola Dan Integritas Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa *Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNIPMA Hal 271-277*

KUESIONER

PENGARUH TATA KELOLA DAN INTEGRITAS TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DANA DESA DI KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH

Demografi Responden

1. Nama :(boleh tidak diisi)
2. Umur : ☐ 25-30 Tahun
☐ 31-35 Tahun
☐ 36-40 Tahun
☐ 41-45 Tahun
☐ 46-50 Tahun
☐ >50 Tahun
3. Jenis Kelamin : ☐ Laki-laki
☐ Perempuan
2. Pendidikan : ☐ SLTA
☐ DIII
☐ S.1
☐ S.2
5. Masa Kerja : ☐ <5 Tahun
☐ 6-10 Tahun
☐ 11-15 Tahun
☐ >15 Tahun

Petunjuk Pengisian

Mohon Bapak/Ibu memberikan pendapat atas pernyataan-pernyataan berikut, sesuai dengan tingkat persetujuan dengan memberikan tanda cek ($\checkmark$) pada angka pilihan:

<u>Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</u>		Sgt Tdk Setuju	Tdk Setuju	Krg Setuju	Setuju	Sgt Setuju
NO	Berilah tanda silang pada angka yang anda anggap paling tepat untuk mewakili pilihan anda.					
1.	Perangkat desa dapat memberikan informasi mengenai dana Desa jika diminta secara akurat dan lengkap.	☐	☐	☐	☐	☐
2.	Perangkat desa selalu menyebar luaskan informasi penggunaan dana Desa untuk setiap program kegiatan.	☐	☐	☐	☐	☐
3.	Dana desa didukung oleh sistem informasi dan komunikasi (Laporan) yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penggunaan dana desa.	☐	☐	☐	☐	☐
4.	Masyarakat memiliki akses informasi atas suatu keputusan aparatur desa serta adanya tempat pengaduan atas setiap adanya penyimpangan.	☐	☐	☐	☐	☐
5.	Rencana kerja dalam penggunaan dana d ⁵⁷ h disusun sesuai program prioritas pemerintah.	☐	☐	☐	☐	☐
6.	Adanya standar dan nilai yang disepakati bersama sehingga dengan mudah di ketahui adanya penyimpangan.	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Tata Kelola</u>		Sgt Tdk Setuju	Tdk Setuju	Netral	Setuju	Sgt Setuju
NO	Berilah tanda silang pada angka yang anda anggap paling tepat untuk mewakili pilihan anda.					
1.	Penggunaan dana Desa untuk pengembangan sarana- dan prasarana Desa dapat dipertanggungjawabkan secara objektif berdasarkan laporan dan bukti-bukti.	☐	☐	☐	☐	☐
2.	Informasi program kerja/kegiatan yang menggunakan dana Desa telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.	☐	☐	☐	☐	☐
3.	Program kerja/kegiatan yang menggunakan dana Desa telah mengikutsertakan masyarakat dalam setiap tahap mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.	☐	☐	☐	☐	☐
4.	Penyimpangan dana Desa untuk pengembangan sarana- dan prasarana Desa harus di tindak lanjuti secara cepat melalui lembaga hukum.	☐	☐	☐	☐	☐
<u>Integritas</u>		Sgt Tdk Setuju	Tdk Setuju	Krg Setuju	Setuju	Sgt Setuju
NO	Berilah tanda silang pada angka yang anda anggap paling tepat untuk mewakili pilihan anda.					
1.	Aparatur desa selalu terbuka dan jujur mengenai segala sesuatu yang menyangkut dengan penggunaan dana desa	☐	☐	☐	☐	☐
2.	Aparatur desa selalu bertindak secara konsisten (tidak berubah-ubah) walaupun proses pekerjaannya lama dan adanya tekanan dari pihak lain.	☐	☐	☐	☐	☐
3.	Dalam bekerja Aparatur desa selalu bertindak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku walaupun ada situasi tertentu yang terbuka untuk membuat curang.	☐	☐	☐	☐	☐
4.	Aparatur desa selalu melakukan suatu tugas berdasarkan tanggungjawab walaupun tugas tersebut memerlukan kemampuan ekstra dan pengorbanan waktu	☐	☐	☐	☐	☐

LAMPIRAN 2. DATA TABULASI KUESIONER

NO	KARAKTERISTIK				AKUNTABILITAS							TATA KELOLA					INTEGRITAS				
	A1	A2	A3	A4	B1	B2	B3	B4	B5	B6	Y	C1	C2	C3	C4	X1	D1	D2	D3	D4	X2
1	6	1	3	2	4	4	3	3	4	4	3.7	4	4	4	3	3.8	4	4	3	4	3.8
2	5	1	3	1	3	3	3	3	4	4	3.3	3	3	3	4	3.3	3	3	4	3	3.3
3	4	1	3	1	4	4	4	3	4	5	4.0	4	4	5	5	4.5	4	4	4	4	4
4	5	1	1	2	4	4	4	3	4	4	3.8	5	4	4	3	4	4	4	4	4	4
5	5	1	3	1	4	5	4	3	3	3	3.7	4	3	3	4	3.5	4	3	4	3	3.5
6	6	1	3	2	4	3	3	3	4	4	3.5	4	4	4	3	3.8	4	5	3	4	4
7	6	1	1	2	4	4	4	3	4	5	4.0	3	4	4	3	3.5	4	4	3	4	3.8
8	5	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
9	5	1	1	1	2	3	2	3	3	3	2.7	3	2	3	4	3	3	4	3	3	3.3
10	4	2	3	1	4	3	3	3	4	4	3.5	5	4	4	5	4.5	4	4	5	5	4.5
11	3	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
12	6	1	3	2	3	3	3	3	3	3	3.0	4	3	3	3	3.3	3	3	3	3	3
13	5	1	3	2	3	2	2	3	3	3	2.7	4	2	3	4	3.3	2	3	3	3	2.8
14	4	1	1	1	4	4	3	3	4	4	3.7	3	4	4	3	3.5	3	2	4	4	3.3
15	5	1	3	1	3	4	4	3	4	4	3.7	3	3	4	4	3.5	4	3	4	4	3.8
16	6	1	3	2	3	2	2	3	3	3	2.7	3	2	2	4	2.8	2	3	4	3	3
17	5	1	3	1	4	3	3	3	4	4	3.5	4	3	3	4	3.5	3	4	4	4	3.8
18	6	1	3	2	3	3	3	3	4	4	3.3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
19	4	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3.0	4	3	3	4	3.5	3	3	4	3	3.3
20	5	1	1	2	3	2	2	3	3	3	2.7	4	2	3	3	3	4	4	3	3	3.5
21	5	1	3	1	3	4	3	3	3	3	3.2	4	3	4	3	3.5	4	4	3	3	3.5
22	6	1	3	2	3	2	2	3	3	3	2.7	3	2	2	3	2.5	2	3	3	3	2.8
23	5	2	1	2	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	4	3.3	3	3	4	3	3.3
24	4	1	3	1	4	5	4	3	4	5	4.2	4	5	5	4	4.5	5	4	5	4	4.5
25	6	1	3	2	3	4	3	3	3	3	3.2	4	3	3	5	3.8	4	3	5	3	3.8
26	6	1	3	2	3	3	3	3	4	4	3.3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
27	5	1	1	1	5	4	3	3	4	4	3.8	3	4	4	3	3.5	3	3	3	4	3.3
28	4	1	1	1	4	3	3	3	4	4	3.5	5	2	4	4	3.8	3	4	4	4	3.8
29	4	1	3	1	4	3	3	3	3	3	3.2	4	3	3	3	3.3	3	4	3	3	3.3
30	6	1	1	2	4	3	3	3	4	4	3.5	4	4	4	3	3.8	3	4	3	4	3.5
31	6	1	3	2	4	4	4	5	5	5	4.5	4	5	4	5	4.5	4	4	5	5	4.5
32	5	1	3	1	4	4	4	3	3	3	3.5	4	2	3	3	3	3	3	3	3	3
33	4	2	1	1	4	4	4	3	5	5	4.2	4	4	4	5	4.3	4	5	5	4	4.5
34	4	1	3	1	4	4	4	3	4	5	4.0	4	4	4	4	4	3	3	4	4	3.5
35	4	2	3	1	2	3	2	3	3	3	2.7	3	2	2	3	2.5	3	2	3	3	2.8
36	4	1	3	1	4	4	3	3	4	4	3.7	4	3	4	4	3.8	4	4	4	4	4
37	5	1	3	1	4	4	4	3	4	4	3.8	4	4	4	3	3.8	4	4	3	4	3.8
38	5	1	1	2	3	3	3	3	4	4	3.3	4	3	3	4	3.5	3	3	4	3	3.3
39	6	1	1	2	3	3	3	3	4	4	3.3	4	3	4	3	3.5	4	4	3	3	3.5
40	5	1	3	1	5	4	5	3	4	4	4.2	4	4	5	4	4.3	5	4	5	4	4.5
41	4	1	3	1	4	3	4	3	3	3	3.3	3	3	3	3	3	3	4	3	3	3.3
42	5	1	1	2	5	3	4	3	4	4	3.8	5	4	4	5	4.5	4	4	3	4	3.8
43	5	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
44	6	2	3	2	4	3	4	3	4	4	3.7	4	3	3	4	3.5	3	4	4	4	3.8
45	6	1	1	2	4	3	3	3	4	4	3.5	3	3	4	5	3.8	3	3	4	4	3.5
46	5	1	3	1	4	4	4	3	4	5	4.0	4	4	4	5	4.3	4	4	3	4	3.8
47	5	1	1	1	4	3	4	3	3	3	3.3	4	4	3	4	3.8	3	4	3	3	3.3
48	4	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2.8
49	4	1	3	1	4	3	4	3	4	4	3.7	4	3	4	3	3.5	5	4	3	4	4
50	5	2	1	1	4	3	4	3	3	3	3.3	5	3	3	5	4	3	5	3	3	3.5
51	6	1	1	2	3	3	3	3	4	4	3.3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
52	6	1	1	2	4	4	4	4	5	5	4.3	4	5	5	5	4.8	4	4	5	4	4.3
53	4	1	1	1	5	4	5	3	4	4	4.2	5	4	4	3	4	4	5	3	4	4
54	5	1	1	1	4	4	4	3	3	3	3.5	4	3	4	3	3.5	4	4	3	3	3.5
55	4	1	1	1	4	5	4	4	5	5	4.5	4	5	5	3	4.3	5	4	3	5	4.3
56	6	1	3	2	5	5	4	4	3	3	4.0	3	4	5	3	3.8	5	3	3	4	3.8
57	5	1	3	1	4	5	4	4	5	5	4.5	4	4	5	3	4	4	4	5	5	4.5
58	6	1	1	2	3	3	3	3	4	4	3.3	4	3	3	3	3.3	3	4	3	3	3.3
59	4	1	3	1	4	4	4	3	3	3	3.5	4	3	3	3	3.3	3	4	3	3	3.3
60	5	1	1	2	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
61	5	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
62	6	1	3	2	4	4	4	3	4	4	3.8	4	3	3	4	3.5	4	4	4	4	4
63	4	1	3	1	2	3	2	3	3	3	2.7	3	2	2	3	2.5	3	2	3	3	2.8
64	5	1	3	1	4	4	4	3	4	4	3.8	5	4	4	5	4.5	3	4	3	4	3.5
65	5	1	1	1	4	4	4	3	3	3	3.5	4	4	3	4	3.8	3	4	3	3	3.3
66	4	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	3	3	2	3	3	3	2.8
67	4	1	3	1	4	4	4	3	4	4	3.8	4	3	4	3	3.5	5	4	3	4	4
68	5	1	1	1	4	4	4	3	3	3	3.5	5	3	3	5	4	4	5	3	3	3.8
69	6	1	1	2	3	3	3	3	4	4	3.3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
70	6	1	1	2	4	4	4	4	5	5	4.3	5	5	4	5	4.8	4	4	5	4	4.3
71	6	1	3	2	4	4	3	3	4	4	3.7	4	4	4	3	3.8	4	4	3	4	3.8
72	5	2	3	1	3	3	3	3	4	4	3.3	4	3	3	4	3.5	3	3	4	3	3.3
73	4	1	3	1	4	4	4	3	4	5	4.0	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
74	5	1	1	2	4	4	4	3	4	4	3.8	3	4	4	3	3.5	4	4	4	4	4
75	5	1	3	1	4	5	4	3	3	3	3.7	4	3	5	4	4	4	4	4	3	3.8
76	6	1	3	2	3	3	3	3	4	4	3.3	4	4	4	3	3.8	4	5	3	4	4
77	6	1	1	2	4	4	4	3	4	5	4.0	3	4	4	3	3.5	4	4	3	4	3.8
78	5	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
79	5	1	1	1	4	4	4	4	5	5	4.3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
80	4	2	3	1	3	3	3	3	4	4	3.3	5	4	4	5	4.5	4	4	5	5	4.5
81	3	1	3	1	3	3	3	3	3	3	3.0	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
82	6	1	3	2	3	3	3	3	3	3	3.0	4	3	3	3	3.3	3	3	3	3	3
83	5	2	3	2	3	2	2	3	3	3	2.7	4	2	3	4	3.3	2	3	3	3	2.8
84	4	1	1	1	4	4	4	4	4	4	4.0	3	4								

Frequency Table

Umur

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	31-35 tahun	2	2.2	2.2	2.2
	35-40 tahun	24	26.7	26.7	28.9
	41-45 tahun	37	41.1	41.1	70.0
	46-50 tahun	27	30.0	30.0	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Jenis kelamin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Laki-laki	81	90.0	90.0	90.0
	Perempuan	9	10.0	10.0	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Pendidikan

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SLTA	32	35.6	35.6	35.6
	SI	58	64.4	64.4	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Pengalaman

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 10 tahun	53	58.9	58.9	58.9
	10-15 tahun	37	41.1	41.1	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Perangkat desa dapat memberikan informasi mengenai dana Desa jika diminta secara akurat dan lengkap.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk setuju	3	3.3	3.3	3.3
	Krg setuju	36	40.0	40.0	43.3
	Setuju	46	51.1	51.1	94.4
	Sgt setuju	5	5.6	5.6	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Perangkat desa selalu menyebar luaskan informasi penggunaan dana Desa untuk setiap program kegiatan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk setuju	6	6.7	6.7	6.7
	Krg setuju	43	47.8	47.8	54.4
	Setuju	35	38.9	38.9	93.3
	Sgt setuju	6	6.7	6.7	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Dana desa didukung oleh sistem informasi dan komunikasi (Laporan) yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penggunaan dana desa.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk setuju	9	10.0	10.0	10.0
	Krg setuju	41	45.6	45.6	55.6
	Setuju	38	42.2	42.2	97.8
	Sgt setuju	2	2.2	2.2	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Masyarakat memiliki akses informasi atas suatu keputusan aparatur desa serta adanya tempat pengaduan atas setiap adanya penyimpangan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg setuju	82	91.1	91.1	91.1
	Setuju	7	7.8	7.8	98.9
	Sgt setuju	1	1.1	1.1	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Rencana kerja dalam penggunaan dana desa telah disusun sesuai program prioritas pemerintah.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg setuju	37	41.1	41.1	41.1
	Setuju	46	51.1	51.1	92.2
	Sgt setuju	7	7.8	7.8	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Adanya standar dan nilai yang disepakati bersama sehingga dengan mudah di ketahui adanya penyimpangan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg setuju	37	41.1	41.1	41.1
	Setuju	38	42.2	42.2	83.3
	Sgt setuju	15	16.7	16.7	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Penggunaan dana Desa untuk pengembangan sarana- dan prasarana Desa dapat dipertanggungjawabkan secara objektif berdasarkan laporan dan bukti-bukti.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg setuju	33	36.7	36.7	36.7
	Setuju	46	51.1	51.1	87.8
	Sgt setuju	11	12.2	12.2	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Informasi program kerja/kegiatan yang menggunakan dana Desa telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk setuju	11	12.2	12.2	12.2
	Krg setuju	44	48.9	48.9	61.1
	Setuju	30	33.3	33.3	94.4
	Sgt setuju	5	5.6	5.6	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Program kerja/kegiatan yang menggunakan dana Desa telah mengikutsertakan masyarakat dalam setiap tahap mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk setuju	5	5.6	5.6	5.6
	Krg setuju	41	45.6	45.6	51.1
	Setuju	36	40.0	40.0	91.1
	Sgt setuju	8	8.9	8.9	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Penyimpangan dana Desa untuk pengembangan sarana- dan prasarana Desa harus di tindak lanjuti secara cepat melalui lembaga hukum.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg setuju	49	54.4	54.4	54.4
	Setuju	26	28.9	28.9	83.3
	Sgt setuju	15	16.7	16.7	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Aparatur desa selalu terbuka dan jujur mengenai segala sesuatu yang menyangkut dengan penggunaan dana desa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk setuju	7	7.8	7.8	7.8
	Krg setuju	41	45.6	45.6	53.3
	Setuju	36	40.0	40.0	93.3
	Sgt setuju	6	6.7	6.7	100.0

Aparatur desa selalu terbuka dan jujur mengenai segala sesuatu yang menyangkut dengan penggunaan dana desa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk setuju	7	7.8	7.8	7.8
	Krg setuju	41	45.6	45.6	53.3
	Setuju	36	40.0	40.0	93.3
	Sgt setuju	6	6.7	6.7	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Aparatur desa selalu bertindak secara konsisten (tidak berubah-ubah) walaupun proses pekerjaannya lama dan adanya tekanan dari pihak lain.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tdk setuju	4	4.4	4.4	4.4
	Krg setuju	35	38.9	38.9	43.3
	Setuju	45	50.0	50.0	93.3
	Sgt setuju	6	6.7	6.7	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Dalam bekerja Aparatur desa selalu bertindak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku walaupun ada situasi tertentu yang terbuka untuk membuat curang.

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg setuju	52	57.8	57.8	57.8
	Setuju	28	31.1	31.1	88.9
	Sgt setuju	10	11.1	11.1	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Aparatur desa selalu melakukan suatu tugas berdasarkan tanggungjawab walaupun tugas tersebut memerlukan kemampuan ekstra dan pengorbanan waktu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Krg setuju	45	50.0	50.0	50.0
	Setuju	40	44.4	44.4	94.4
	Sgt setuju	5	5.6	5.6	100.0
	Total	90	100.0	100.0	

Correlations

Correlations								
		B1	B2	B3	B4	B5	B6	Y
B1	Pearson Correlation	1	.594**	.759**	.241*	.409**	.428**	.775**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.022	.000	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
B2	Pearson Correlation	.594**	1	.740**	.365**	.395**	.452**	.797**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
B3	Pearson Correlation	.759**	.740**	1	.274**	.419**	.471**	.831**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.009	.000	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
B4	Pearson Correlation	.241*	.365**	.274**	1	.486**	.378**	.523**
	Sig. (2-tailed)	.022	.000	.009		.000	.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
B5	Pearson Correlation	.409**	.395**	.419**	.486**	1	.921**	.788**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
B6	Pearson Correlation	.428**	.452**	.471**	.378**	.921**	1	.810**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	90	90	90	90	90	90	90
Y	Pearson Correlation	.775**	.797**	.831**	.523**	.788**	.810**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	90	90	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Correlations

		C1	C2	C3	C4	X1
C1	Pearson Correlation	1	.531**	.290**	.589**	.772**
	Sig. (2-tailed)		.000	.006	.000	.000
	N	90	90	90	90	90
C2	Pearson Correlation	.531**	1	.089	.397**	.586**
	Sig. (2-tailed)	.000		.406	.000	.000
	N	90	90	90	90	90
C3	Pearson Correlation	.290**	.089	1	.496**	.685**
	Sig. (2-tailed)	.006	.406		.000	.000
	N	90	90	90	90	90
C4	Pearson Correlation	.589**	.397**	.496**	1	.834**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000
	N	90	90	90	90	90
X1	Pearson Correlation	.772**	.586**	.685**	.834**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Correlations

		D1	D2	D3	D4	X2
D1	Pearson Correlation	1	.533**	.501**	.244*	.619**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.020	.000
	N	90	90	90	90	90
D2	Pearson Correlation	.533**	1	.532**	.348**	.678**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.000
	N	90	90	90	90	90
D3	Pearson Correlation	.501**	.532**	1	.584**	.828**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000
	N	90	90	90	90	90
D4	Pearson Correlation	.244*	.348**	.584**	1	.783**
	Sig. (2-tailed)	.020	.001	.000		.000
	N	90	90	90	90	90
X2	Pearson Correlation	.619**	.678**	.828**	.783**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	90	90	90	90	90

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

LAMPIRAN 5. HASIL UJI RELIABILITAS

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	90	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	90	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.852	.852	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
B1	3.5889	.65161	90
B2	3.4556	.72144	90
B3	3.3667	.69428	90
B4	3.1000	.33687	90
B5	3.6667	.61808	90
B6	3.7556	.72377	90

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3.489	3.100	3.756	.656	1.211	.056	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
B1	17.3444	5.936	.656	.589	.824
B2	17.4778	5.623	.673	.591	.822
B3	17.5667	5.574	.729	.711	.809
B4	17.8333	7.534	.431	.329	.863
B5	17.2667	5.996	.683	.876	.820
B6	17.1778	5.564	.690	.869	.818

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	90	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	90	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.838	.844	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
C1	3.7556	.65875	90
C2	3.3222	.76184	90
C3	3.5222	.73786	90
C4	3.6222	.75814	90

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3.555	3.322	3.756	.433	1.130	.020	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
C1	17.6000	7.344	.536	.384	.826
C2	18.0333	6.572	.650	.569	.805
C3	17.8333	6.545	.689	.706	.796
C4	17.7333	7.344	.432	.371	.850

Reliability

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	90	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	90	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.813	.816	6

Item Statistics

	Mean	Std. Deviation	N
D1	3.4556	.73685	90
D2	3.5889	.68523	90
D3	3.5333	.69022	90
D4	3.5556	.60170	90

Summary Item Statistics

	Mean	Minimum	Maximum	Range	Maximum / Minimum	Variance	N of Items
Item Means	3.533	3.4556	3.589	.133	1.039	.017	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
D1	17.2778	5.843	.635	.490	.769
D2	17.1444	6.754	.400	.309	.821
D3	17.2000	6.342	.526	.681	.794
D4	17.1778	6.058	.752	.654	.749

LAMPIRAN 7. HASIL ANALISIS REGRESI LINIER

Regression

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	Tata kelola, Integritas ^a		. Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan dana desa

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.837 ^a	.701	.694	.26797

a. Predictors: (Constant), Tata kelola, Integritas

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	14.630	2	7.315	101.867	.000 ^a
	Residual	6.248	87	.072		
	Total	20.878	89			

a. Predictors: (Constant), Tata kelola, Integritas

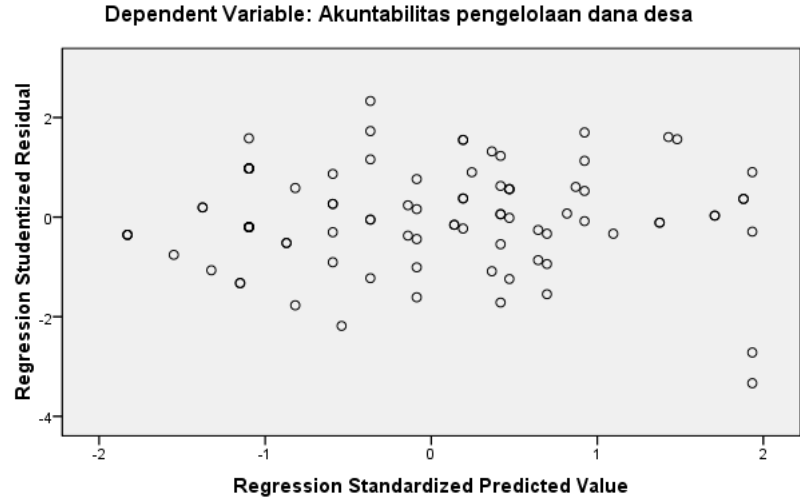
b. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan dana desa

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.576	.206		2.791	.006		
	Pemahaman perangkat desa	.420	.119	.425	3.528	.001	.237	4.213
	Tata kelola	.411	.112	.440	3.658	.000	.237	4.213

a. Dependent Variable: Akuntabilitas pengelolaan dana desa

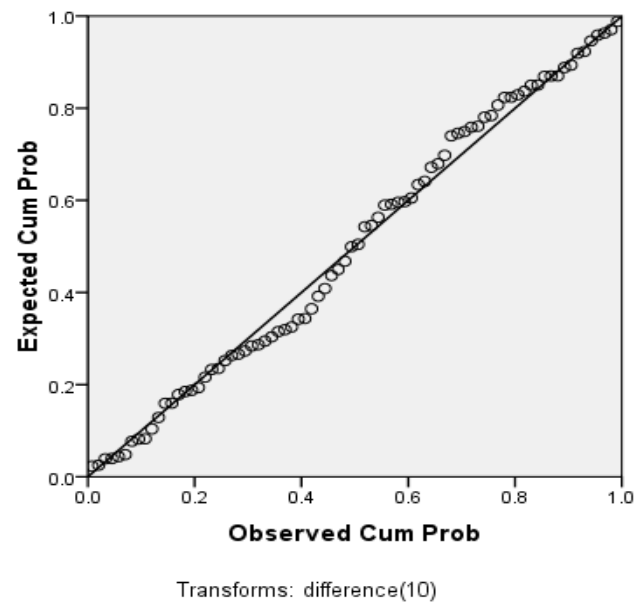
Scatterplot



PPlot

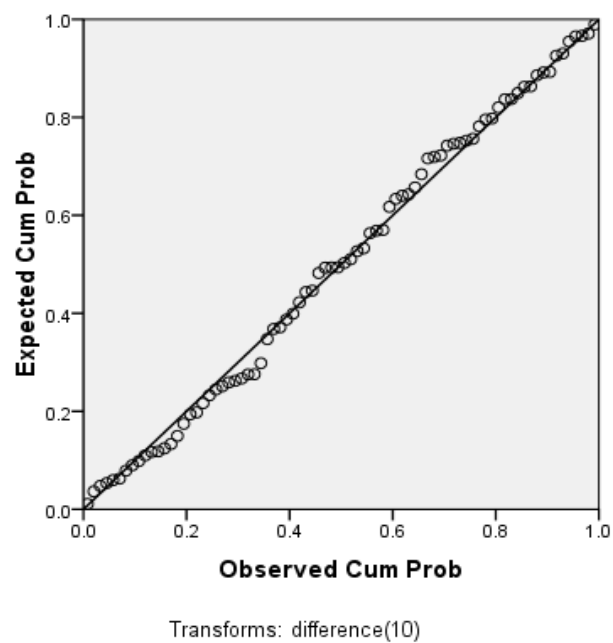
Akuntabilitas pengelolaan dana desa pengelolaan dana desa

Normal P-P Plot of Akuntabilitas pengelolaan dana desa

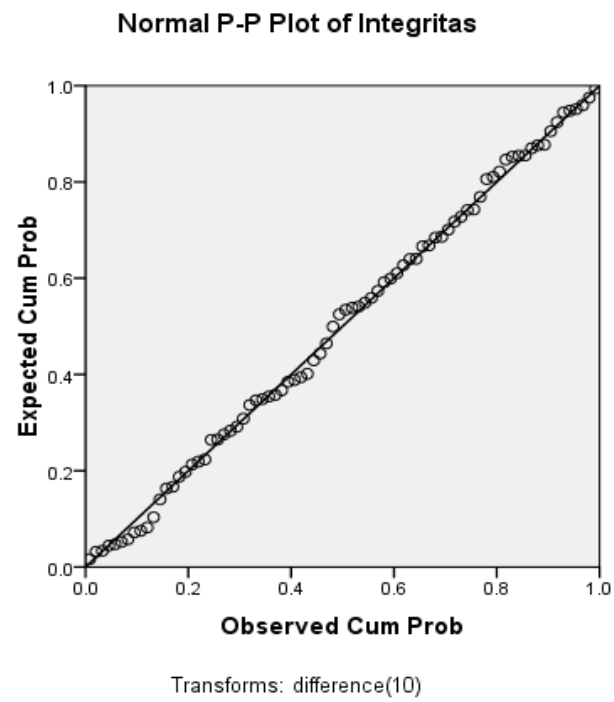


Tata kelola

Normal P-P Plot of Tata kelola



Integritas



LAMPIRAN 7. TABEL STATISTIK

NILAI-NILAI r PRODUCT MOMENT

N	Taraf Signif		N	Taraf Signif		N	Taraf Signif	
	5%	1%		5%	1%		5%	1%
3	0.997	0.999	27	0.381	0.487	55	0.266	0.345
4	0.950	0.990	28	0.374	0.478	60	0.254	0.330
5	0.878	0.959	29	0.367	0.470	65	0.244	0.317
6	0.811	0.917	30	0.361	0.463	70	0.235	0.306
7	0.754	0.874	31	0.355	0.456	75	0.227	0.296
8	0.707	0.834	32	0.349	0.449	80	0.220	0.286
9	0.666	0.798	33	0.344	0.442	85	0.213	0.278
10	0.632	0.765	34	0.339	0.436	90	0.207	0.270
11	0.602	0.735	35	0.334	0.430	95	0.202	0.263
12	0.576	0.708	36	0.329	0.424	100	0.195	0.256
13	0.553	0.684	37	0.325	0.418	125	0.176	0.230
14	0.532	0.661	38	0.320	0.413	150	0.159	0.210
15	0.514	0.641	39	0.316	0.408	175	0.148	0.194
16	0.497	0.623	40	0.312	0.403	200	0.138	0.181
17	0.482	0.606	41	0.308	0.398	300	0.113	0.148
18	0.468	0.590	42	0.304	0.393	400	0.098	0.128
19	0.456	0.575	43	0.301	0.389	500	0.088	0.115
20	0.444	0.561	44	0.297	0.384	600	0.080	0.105
21	0.433	0.549	45	0.294	0.380	700	0.074	0.097
22	0.423	0.537	46	0.291	0.376	800	0.070	0.091
23	0.413	0.526	47	0.288	0.372	900	0.065	0.086
24	0.404	0.515	48	0.284	0.368	1000	0.062	0.081
25	0.396	0.505	49	0.281	0.364			
26	0.388	0.496	50	0.279	0.361			

Tabel t

Df	0,1	0,05	0,02	0,01
64	1,669	1,998	2,386	2,655
65	1,669	1,997	2,385	2,654
66	1,668	1,997	2,384	2,652
67	1,668	1,996	2,383	2,651
68	1,668	1,995	2,382	2,65
69	1,667	1,995	2,382	2,649
70	1,667	1,994	2,381	2,648
71	1,667	1,994	2,38	2,647
72	1,666	1,993	2,379	2,646
73	1,666	1,993	2,379	2,645
74	1,666	1,993	2,378	2,644
75	1,665	1,992	2,377	2,643
76	1,665	1,992	2,376	2,642
77	1,665	1,991	2,376	2,641
78	1,665	1,991	2,375	2,64
79	1,664	1,99	2,374	2,64
80	1,664	1,99	2,374	2,639
81	1,664	1,99	2,373	2,638
82	1,664	1,989	2,373	2,637
83	1,663	1,989	2,372	2,636
84	1,663	1,989	2,372	2,636
85	1,663	1,988	2,371	2,635
86	1,663	1,988	2,37	2,634
87	1,663	1,988	2,37	2,634
88	1,662	1,987	2,369	2,633
89	1,662	1,987	2,369	2,632
90	1,662	1,987	2,368	2,632
91	1,662	1,986	2,368	2,631
92	1,662	1,986	2,368	2,63
93	1,661	1,986	2,367	2,63
94	1,661	1,986	2,367	2,629
95	1,661	1,985	2,366	2,629
96	1,661	1,985	2,366	2,628
97	1,661	1,985	2,365	2,627
98	1,661	1,984	2,365	2,627
99	1,66	1,984	2,365	2,626
100	1,66	1,984	2,364	2,626

TABEL F
Titik Persentase Distribusi F untuk Probabilita = 0,05

df2\df1	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	10.13	9.55	9.28	9.12	9.01	8.94	8.89	8.85	8.81
2	7.71	6.94	6.59	6.39	6.26	6.16	6.09	6.04	6.00
3	6.61	5.79	5.41	5.19	5.05	4.95	4.88	4.82	4.77
4	5.99	5.14	4.76	4.53	4.39	4.28	4.21	4.15	4.10
5	5.59	4.74	4.35	4.12	3.97	3.87	3.79	3.73	3.68
6	5.32	4.46	4.07	3.84	3.69	3.58	3.50	3.44	3.39
7	5.12	4.26	3.86	3.63	3.48	3.37	3.29	3.23	3.18
8	4.96	4.10	3.71	3.48	3.33	3.22	3.14	3.07	3.02
9	4.84	3.98	3.59	3.36	3.20	3.09	3.01	2.95	2.90
10	4.75	3.89	3.49	3.26	3.11	3.00	2.91	2.85	2.80
11	4.67	3.81	3.41	3.18	3.03	2.92	2.83	2.77	2.71
12	4.60	3.74	3.34	3.11	2.96	2.85	2.76	2.70	2.65
13	4.54	3.68	3.29	3.06	2.90	2.79	2.71	2.64	2.59
14	4.49	3.63	3.24	3.01	2.85	2.74	2.66	2.59	2.54
15	4.45	3.59	3.20	2.96	2.81	2.70	2.61	2.55	2.49
16	4.41	3.55	3.16	2.93	2.77	2.66	2.58	2.51	2.46
17	4.38	3.52	3.13	2.90	2.74	2.63	2.54	2.48	2.42
18	4.35	3.49	3.10	2.87	2.71	2.60	2.51	2.45	2.39
19	4.30	3.44	3.05	2.82	2.66	2.55	2.46	2.40	2.34
20	4.26	3.40	3.01	2.78	2.62	2.51	2.42	2.36	2.30
22	4.23	3.37	2.98	2.74	2.59	2.47	2.39	2.32	2.27
24	4.20	3.34	2.95	2.71	2.56	2.45	2.36	2.29	2.24
26	4.17	3.32	2.92	2.69	2.53	2.42	2.33	2.27	2.21
28	4.12	3.27	2.87	2.64	2.49	2.37	2.29	2.22	2.16
30	4.08	3.23	2.84	2.61	2.45	2.34	2.25	2.18	2.12
35	4.06	3.20	2.81	2.58	2.42	2.31	2.22	2.15	2.10
40	4.03	3.18	2.79	2.56	2.40	2.29	2.20	2.13	2.07
45	4.00	3.15	2.76	2.53	2.37	2.25	2.17	2.10	2.04
50	3.98	3.13	2.74	2.50	2.35	2.23	2.14	2.07	2.02
60	3.96	3.11	2.72	2.49	2.33	2.21	2.13	2.06	2.00
70	3.94	3.09	2.70	2.46	2.31	2.19	2.10	2.03	1.97
80	3.89	3.04	2.65	2.42	2.26	2.14	2.06	1.98	1.93
91	3.95	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98
92	3.94	3.10	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98
93	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98
94	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98
95	3.94	3.09	2.70	2.47	2.31	2.20	2.11	2.04	1.98